



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA DAN PEMBINAAN PERUSTAKAAN DI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013**

**THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT PROGRAM OF
READING CULTURE AND LIBRARY DEVELOPMENT OF BANYUWANGI
SUBDISTRICT REGENCY IN THE 2013 YEAR**

SKRIPSI

Oleh:
Anggun Pramita Sari
090910201079

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

SKRIPSI INI TIDAK BOLEH DIKUTIP



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013**

*(The Implementation of the development program of reading culture and library
development of Banyuwangi Subdistrict Regency in the 2013 Year)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:
Anggun Pramita Sari
090910201079

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, Syukur Alhamdulillah Rabil ‘alamin akhirnya satu kewajiban telah aku selesaikan dan semua ini tulus kupersembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, pengabdian, ungkapan terima kasihku, hormat dan kasih sayanku kepada:

1. Ibundaku tersayang Farida Kholifa dan Ayahanda Ponimin yang tiada pernah lelah mendoakan dan menyayangi hingga saat ini. Terima kasih yang tiada terhingga atas pengorbanan Ibu dan Ayah selama ini.
2. Kakakku Febby Asma Firmansyah yang senantiasa mensupport dan mendukungku selama ini untuk menyelesaikan studi.
3. Guru dan para dosen yang telah memberikan ilmu padaku dari Taman Kanak-Kanak hingga Sarjana, terima kasih yang tiada terhingga.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah
dalam menghadapi cobaan”¹



¹ www.azhie.net/2012

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Anggun Pramita Sari

NIM : 090910201079

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2015

Yang menyatakan,

Anggun Pramita Sari

090910201079

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013**

Oleh:

Anggun Pramita Sari
NIM 090910201079

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Suji, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 23 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji
Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M.Si
NIP. 195307311980022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Mengesahkan
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

“Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013”;
Anggun Pramita Sari, 090910201079; 2015: 81 Halaman; Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan jenis deskriptif, yakni sebuah penelitian yang ingin mengungkapkan apa adanya di lapangan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*, sedangkan informan pendukung ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam metode analisis data interaktif terdapat beberapa aktivitas/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh penulis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 belum berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik karena pelaksanaannya mendadak, sehingga tidak banyak diketahui orang dan hanya berjalan kurang lebih tiga bulan. Pedoman implementasi program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus

Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kecamatan Banyuwangi menyediakan 2 mobil yang beroperasi secara bergantian pada hari Senin sampai Jumat di tempat yang telah ditentukan dan setiap tempat mendapatkan jadwal tiga kali dalam seminggu mulai dari jam 12.00 sampai dengan 15.00. Seharusnya program ini dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, namun karena waktu yang terbatas serta personel dan akomodasi yang minim, maka program perpustakaan keliling hanya dilakukan di kelurahan yang berada di Banyuwangi kota, yakni kelurahan Kelurahan Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, Karangrejo, dan Kertosari.

Ada tiga saran yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan implemenasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Saran yang pertama adalah untuk implementasi program perpustakaan keliling selanjutnya diharapkan menambah mobil dan personel agar dapat lebih memberikan pelayanan prima pada masyarakat karena jumlah kendaraan dan personel sangat minim untuk program ini. Saran yang kedua adalah sebaiknya program perpustakaan keliling ini diimplementasikan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, jangan hanya di kelurahan yang ada di dalam kota agar tujuan program perpustakaan keliling sebagai sarana meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak dan remaja di Kecamatan Banyuwangi dapat tercapai. Dan saran terakhir adalah koordinasi dan sosialisasi dengan unsur pemerintah lainnya serta *stakeholder* lain sangat penting dilakukan sebelum suatu program diimplementasikan agar program ini nantinya diketahui dan diharapkan mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*, sehingga tujuan program lebih mudah dicapai.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edi Wahyudi, S. Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Supranoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing utama. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, saran, bimbingan, pemikiran, kesabaran, dan juga kontribusinya selama ini dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Suji, S.sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah member banyak pengarahan dalam skripsi ini.
6. Bapak Abdul Aziz Hamidi, selaku Camat Banyuwangi dan seluruh pegawai di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terimakasih yang telah mengijinkan saya melakukan penelitian.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Bapak Mulyono dan pelayanan kelas terimakasih sudah memberikan pelayanan yang baik.
9. Claudia Rizka, Putik Cyntia, Findy, Mahardini Kusuma, David Prihanditya, Frandy Anggriawan, Arylian, Primadinni, dan seluruh teman-teman dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan

tahun 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi yang sudah diberikan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Rizky Pramudya Putra terimakasih atas dukunganmu selama ini.

11. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Di dunia tiada yang sempurna, begitu juga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi program studi Administrasi Negara Universitas Jember.

Jember, 5 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Manfaat Penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kebijakan Publik	18
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	21
2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan	25
2.2.1.1 Model Implementasi Menurut Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier	25
2.2.1.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	27

2.2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn.	28
2.2.1.4 Model Implementasi Kebijakan George Edward III.....	30
2.3 Diskresi Pelaksana Program.....	37
2.4 Program Kerja.....	39
2.5 Proyek.....	42
2.6 Kerangka Berfikir	44
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Fokus Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	46
3.3 Lokasi Penelitian	47
3.4 Penentuan Informan	47
3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Metode Analisis Data	50
3.7 Uji Keabsahan Data	52
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Deskripsi Daerah dan Penelitian.....	53
4.1.1 Keadaan Geografis.....	53
4.1.2 Kependudukan	54
4.1.3 Ekonomi.....	56
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	59
4.2.2 Sumber-Sumber Kebijakan	62
4.2.3 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.....	66
4.2.4 Karakteristik Badan Pelaksana	68
4.2.5 Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	70
4.2.6 Kecenderungan Pelaksana (<i>Implementors</i>).....	73
BAB 5. PENUTUP	80

5.1 Kesimpulan 80
5.2 Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jenjang Pendidikan Personil Kecamatan Banyuwangi	4
4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kelurahan.....	55
4.2 Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha.....	56
4.3 Pagu dan Rincian Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013	62
4.4 Realisasi Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013	63
4.5 Matrik Hasil Analisis Data Implementasi Rencana Kerja Kecamatann Banyuwangi Tahun 2013 yang Difokuskan pada Program Pegembangann Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier	26
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	28
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	31
Gambar 2.6 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	51

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Permohonan ijin penelitian (Fisip UNEJ)
- B. Permohonan ijin melaksanakan penelitian (Lembaga Penelitian Universitas Jember).
- C. Permohonan ijin penelitian (Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi).
- D. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013.
- E. Anggaran dan realisasi setiap program Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013.
- F. Surat perintah tugas Nomor: 010/616/429.501/2013.
- G. Pedoman wawancara.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Sedangkan rencana kerja (Renja) adalah proses perencanaan kinerja dalam jangka waktu satu tahun yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 disebutkan bahwa “Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumberdaya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial *cultural* dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan *good governance* yang memuat enam prinsip berikut ini.

1. Akuntabilitas.
2. Transparansi.
3. *Rule of law*.
4. Profesionalisme.

5. Efektivitas.
6. Efisiensi

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan daerah otonom”.

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar wewenang yang dilimpahkan, maka semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Di samping melaksanakan tugas dari Bupati, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi tujuh hal berikut ini.

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan secara cermat, terarah, dan komprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan, dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Camat berkewajiban membuat Rencana Kerja kepada Bupati (Renja Kecamatan Banyuwangi, 2012:2).

Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kecamatan Banyuwangi mengkoordinasikan 18 kelurahan berikut.

1. Kelurahan Pakis.
2. Kelurahan Sobo.
3. Kelurahan Kebalenan.
4. Kelurahan Penganjuran.
5. Kelurahan Tukangkayu.
6. Kelurahan Kertosari.
7. Kelurahan Karangrejo.
8. Kelurahan Kepatihan.
9. Kelurahan Panderejo.
10. Kelurahan Singonegaran.
11. Kelurahan Temenggungan.
12. Kelurahan Kampung Melayu.
13. Kelurahan Kampung Mandar.
14. Kelurahan Laten.
15. Kelurahan Singotrunan.
16. Kelurahan Pengantigan.
17. Kelurahan Samberejo.
18. Kelurahan Tamanbaru.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Kecamatan Banyuwangi dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu seorang Sekertaris, lima orang kepala seksi, dua orang Kasubag, dan dua puluh satu orang staf. Jenjang

pendidikan 30 orang personil Kecamatan Banyuwangi tersebut bervariasi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jenjang pendidikan personil Kecamatan Banyuwangi

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	9
3.	SMA	18

Sumber: Renstra Kecamatan Banyuwangi Tahun 2011-2015

Layaknya kecamatan atau instansi lain, Kecamatan Banyuwangi juga mempunyai Renja dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Renja SKPD Kecamatan Banyuwangi disusun berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi SKPD Kecamatan Banyuwangi saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Banyuwangi adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Banyuwangi guna mewujudkan keadaan satu tahun ke depan yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun oleh semua masyarakat, sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mengkedepankan pengakuan dari elemen masyarakat.

Tujuan Renja merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Namun tujuan Renja lebih mengarah pada periode satu tahun anggaran yaitu tahun 2013, antara lain.

1. “Peningkatan kualitas pelayanan, standart pelayanan, dan cakupan ketersediaan infrastruktur yang meliputi sarana dan prasarana fisik, penerangan, air bersih, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta kesejahteraan aparatur pemerintah dengan mengedepankan prinsip pengabdian.
3. Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan dengan mengedepankan azas pemberdayaan dan kemandirian.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel, dan professional”.

Sesuai dengan Renja tahun 2013, Kecamatan Banyuwangi menetapkan lima sasaran strategik berikut ini.

1. “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan keindahan, kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan.
4. Terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah kecamatan di bidang Peraturan Perundang-Undangan”.

Selanjutnya sasaran strategik tersebut diwujudkan dalam program-program berikut ini.

1. “Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program pelayanan publik.
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
5. Program perencanaan pembangunan daerah.
6. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
7. Program-program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur”.

Program-program tersebut di atas dilaksanakan dengan anggaran biaya sebesar Rp 319.220.000,00, sebagaimana terlihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2013. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013 dengan realisasinya. Menurut Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013, 2013:16 “Indikator kinerja adalah

sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang telah dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai, antara lain:

1. “Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
2. Terciptanya lingkungan kantor yang hijau, bersih, dan nyaman.
3. Menurunnya penyandang penyakit social di masyarakat.
4. Terciptanya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan yang tertata rapi.
5. Terciptanya sarana dan prasarana administrasi kantor yang memadai untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat antara lain: tersedianya kebutuhan surat-menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, peralatan kebersihan, perlengkapan kantor, computer, dan alat listrik.
6. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sehingga dapat dipergunakan secara maksimal.
7. Terwujudnya hasil kinerja yang akuntabel dan berdedikasi tinggi (hasil kerja/prestasi kerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan direalisasikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku)”.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi selama tahun 2013, telah sesuai dengan sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2013 dan DP-SKPD tahun 2013 (LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013, 2014:IV). Untuk mengetahui secara rinci mengenai tingkat capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada lampiran A.

Kecamatan Banyuwangi akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa kecamatan ini merupakan kecamatan terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan secara keseluruhan menurut LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 hasil capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi selama tahun 2013 telah sesuai dengan sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2013 dan DP-SKPD tahun 2013. Namun apakah program kerja ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada atau tidak belum diketahui secara pasti, oleh karena itu penting dilakukan kajian implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan merupakan usaha untuk membandingkan apa yang ada dalam aturan dengan kenyataannya di lapangan.

Selain itu, pertimbangan lain menjadikan Kecamatan Banyuwangi sebagai lokasi penelitian karena selama 5 tahun berturut-turut Kecamatan Banyuwangi memperoleh penghargaan sebagai juara 1 (Kategori Kecamatan) dalam Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini mengidentifikasikan bahwa pelayanan publik yang terjadi di Kecamatan Banyuwangi sudah sesuai dengan harapan masyarakat serta program kerja yang ada di Kecamatan Banyuwangi selama ini selalu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Namun ketika ada pembuatan *e- KTP*, masyarakat banyak yang mengeluh dengan pelayanan di kantor ini karena mereka harus antri sampai larut malam, begitu juga saat pengambilan *e- KTP* yang juga harus antri sampai berdesak-desakan. Padahal seharusnya pembuatan dan pengambilan *e- KTP* ini prosesnya cepat dan tertip sesuai dengan program kerja yang ada. Hal ini berarti, pelayanan publik yang ada di Kecamatan Banyuwangi terutama yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan masih belum memenuhi harapan masyarakat padahal dalam LAKIP hal ini sudah mencapai target 100% karena rata-rata lama penyelesaian pengajuan *KTP* per *KTP* jika syaratnya lengkap ditargetkan 5 menit.

Jumlah program kerja yang terdapat di Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 dan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 juga tidak sama karena jumlah program kerja yang terdapat di Rencana Kerja Kecamatan tujuh, sedangkan program kerja yang terdapat di LAKIP terdapat delapan program. Hal ini mengidentifikasikan bahwa antara formulasi dan implementasi program tidak sama. Yang membedakan program kerja yang ada di Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi dan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 adalah adanya program peningkatan minat baca yang dilakukan melalui kegiatan perpustakaan keliling.

Menurut pernyataan tiga Lurah yang ada di Kecamatan Banyuwangi program ini hanya berjalan beberapa bulan saja karena memasuki bulan ketiga perpustakaan keliling Kecamatan Banyuwangi tidak beroperasi lagi. Hal ini dikarenakan peminat bacanya sedikit akibat buku yang terdapat di perpustakaan itu tidak pernah ganti. Selain itu, buku yang ada di perpustakaan keliling tidak

boleh dipinjam padahal pembaca masih ingin membacanya dan tidak mungkin masyarakat selesai membaca dalam waktu itu. Kedatangan perpustakaan keliling di tempat yang telah dijadwalkan juga tidak tepat waktu karena perpustakaan keliling yang dijadwalkan seminggu dua kali, yakni hari Senen dan Kamis ternyata hanya datang dua Minggu bahkan tiga Minggu sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Heru Kiswanto selaku Lurah Tukang Kayu berikut ini.

“Program perpustakaan keliling di Kecamatan Banyuwangi hanya berjalan tiga bulan saja karena tambah lama peminat bacanya sedikit. Hal ini dikarenakan bukunya tidak boleh dipinjam dan koleksi bukunya juga itu-itu saja sehingga mereka bosan. Jadwal kedatangan perpustakaan keliling ini juga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena kadang dua Minggu sekali bahkan tiga minggu sekali padahal seharusnya setiap minggu dua kali beroperasinya, yakni hari Senen dan Kamis” (*Rabu, 3 september 2014*).

Dari delapan program Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Alasan peneliti mengambil program ini karena antara Renja dengan LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 tidak sama, programnya juga mendadak dilakukan dan banyak pihak yang tidak mengetahui adanya program ini, sehingga hal ini mengidentifikasi bahwa antara formulasi dengan implementasi tidak sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba meneliti mengapa program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi 2013 ada namun di Rencana Kerjanya tidak ada.

Berdasarkan data Susenas BPS (2003) dan Balitbang Diknas (2000/2001), sebagaimana yang terdapat dalam Pendahuluan “Kerangka Acuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Bidang Pendidikan Non-Formal”, diketahui bahwa penduduk Indonesia yang buta aksara usia 10 tahun ke atas ada sekitar 9%, rata-rata lama pendidikan penduduk baru sekitar 7 tahun (artinya, rata-rata penduduk hanya mendapat pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tahun pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penduduk miskin tercatat sekitar 35 juta, pengangguran usia produktif sekitar 9 juta, dan struktur

tenaga kerja yang ada sekitar 63% mempunyai pendidikan SD ke bawah. Dari fakta partisipasi pendidikan dapat dilihat bahwa jumlah anak usia 7 – 24 tahun yang terlayani sesuai dengan pendidikannya (SD, SMP, SMU, dan PT) sekitar 51%, sedangkan yang tidak terlayani sekitar 49%. Anak usia 0 – 6 tahun yang berjumlah sekitar 26,1 juta lebih yang terlayani oleh berbagai satuan Pendidikan Anak Usia Dini baru sekitar 7,2 juta (27%). Pendapat senada juga dikatakan oleh Murahimin (2001:16) sampai sejauh ini membaca apalagi menulis masih dianaktirikan di negeri ini. Pelajaran Menulis (karang-mengarang) tidak diberikan secara maksimal di sekolah-sekolah Indonesia mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Akibatnya, siswa-siswi Indonesia menjadi generasi yang malas membaca dan lumpuh menulis.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah perlu tampil di garis terdepan sebagai penggerak utama peningkatan minat baca masyarakat. Secara umum, amanat tersebut dikemukakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (yang menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu tugas Pemerintah) dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 (yang menyatakan "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia"). Secara spesifik, kewajiban untuk meningkatkan minat baca masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya sinergi antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan minat baca masyarakat, di mana Pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab utama dan Pustakawan yang melakukan kinerja yang optimal.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk (antara lain): mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan, serta menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya, Pasal 48

sampai dengan Pasal 51 UU Perpustakaan mengatur pembudayaan kegemaran membaca. Pembudayaan tersebut dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan difasilitasi oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas (Pasal 48). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca (Pasal 49). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca, dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses (Pasal 50). Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui gerakan nasional gemar membaca, dengan melibatkan seluruh masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai ujung tombaknya (Pasal 51).

Dalam <http://library.perbanas.ac.id> yang diakses tanggal 23 Maret 2015, disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan bisa menghambat masyarakat untuk mencintai dan menyenangi buku sebagai sumber informasi layaknya membaca koran dan majalah, yaitu:

1. Sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat siswa/mahasiswa harus membaca buku lebih banyak dari apa yang diajarkan dan mencari informasi atau pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan di kelas.
2. Banyaknya hiburan TV dan permainan di rumah atau di luar rumah yang membuat perhatian anak atau orang dewasa untuk menjauhi buku. Sebenarnya dengan berkembangnya teknologi internet akan membawa dampak terhadap peningkatan minat baca masyarakat kita, karena internet merupakan sarana visual yang dapat disinonimkan dengan sumber informasi yang lebih update, tetapi hal ini disikapi lain karena yang dicari di internet kebanyakan berupa visual yang kurang tepat bagi konsumsi anak-anak.
3. Banyaknya tempat-tempat hiburan seperti taman rekreasi, karaoke, mall, supermarket dll.
4. Budaya baca masih belum diwariskan oleh nenek moyang kita, hal ini terlihat dari kebiasaan Ibu-Ibu yang sering mendongeng kepada putra-putrinya sebelum anaknya tidur dan ini hanya diaplikasikan secara verbal atau lisan saja dan tidak dibiasakan mencapai pengetahuan melalui bacaan.

5. Para ibu disibukan dengan berbagai kegiatan di rumah/di kantor serta membantu mencari tambahan nafkah untuk keluarga, sehingga waktu untuk membaca sangat minim.
6. Buku dirasakan oleh masyarakat umum sangat mahal dan begitu juga jumlah perpustakaan masih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk yang ada dan kadang-kadang letaknya jauh.

Kebiasaan membaca seperti yang telah disebutkan di atas bersinergi dengan kebiasaan menulis (karang-mengarang). Murahimin (2001:17) mengatakan bahwa hubungan membaca dengan menulis sangat erat. Untuk dapat menulis (mengarang), seseorang harus banyak membaca. Membaca merupakan sarana untuk menulis. Oleh karena itu, kebiasaan membaca tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan menulis. Keduanya seperti mata rantai yang masing-masingnya saling mengikat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ghifari (2003:30) bahwa seorang penulis harus banyak membaca. Amati dan minati dunia membaca, kemudian lahirkan karya tulis yang dibutuhkan masyarakat.

Kegiatan pengadaan buku bacaan di daerah ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan minat baca anak-anak dan masyarakat. Peningkatan minat baca anak-anak dan masyarakat di daerah ini merupakan perhatian semua pihak utamanya pemerintah. Peranan pemerintah daerah dibantu oleh kalangan dunia pendidikan, media masa, gerakan masyarakat cinta buku untuk bersama-sama merangkul pihak-pihak swasta yang mempunyai kepentingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mensponsori pendirian perpustakaan-perpustakaan kecil dilingkungan masyarakat seperti desa/kampung dengan bantuan berupa sarana dan prasarana dan koleksi perpustakaan yang pengelolaannya diserahkan kepada Ibu-Ibu PKK atau Karang Taruna.

Layanan Perpustakaan Keliling merupakan salah satu ujung tombak pelayanan dan pembudayaan minat baca yang dilaksanakan di Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013. Program ini merupakan program yang dilaksanakan pada tahun 2013. sebenarnya program ini tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi 2013, namun karena anggaran dana masih banyak ketika menjelang akhir tahun maka dilaksanakan program ini karena minat baca anak-anak dan remaja dirasa kurang oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Bagus Sudartono yang selaku koordinator kegiatan pada tanggal 30 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“Program perpustakaan keliling ini memang tidak ada di Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun karena ada kelebihan dana yang lumayan cukup besar ketika mau tutup anggaran maka ada inisiatif dari Bapak Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi. Jadi program ini langsung kita lakukan begitu saja tanpa koordinasi dengan pihak luar Kecamatan, baik itu dengan Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi karena kita lihat minat baca di kalangan anak-anak dan remaja masih kurang di Kecamatan Banyuwangi”

Kemudian untuk melihat apakah benar program ini mendadak dilakukan, peneliti melakukan wawancara kepada Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi pada tanggal 30 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“memang program ini tidak dianggarkan dalam renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, tapi saat mau tutup buku dana masih banyak. Daripada *mubazir* akhirnya saya canangkan program ini karena kita lihat minat baca di kalangan anak-anak dan remaja masih kurang kalau saya lihat anak-anak saya di rumah jarang sekali membaca”.

Alasan Goenawan mencanangkan program perpustakaan keliling ini adalah rendahnya minat baca di kalangan masyarakat terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang ada di Kecamatan Banyuwangi. Rendahnya minat baca di Kecamatan Banyuwangi juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, Riyanti Ananta yang dilansir dari sunriseofjava.com tanggal 7 April 2015 yang menyatakan bahwa:

Antusiasme masyarakat Banyuwangi untuk mengunjungi perpustakaan daerah ternyata sangat kurang. Hal ini dilihat dari jumlah kunjungan ke kantor perpustakaan Banyuwangi yang hanya mencapai 75 hingga 80 pengunjung per hari. Tingkat kunjungan yang sangat kecil tersebut tidak sebanding dengan kunjungan ke perpustakaan di kabupaten lain yang bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung per harinya. Hal ini menandakan bahwa kurangnya minat baca di kalangan masyarakat Banyuwangi.

Program diadakan Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi ini disambut baik oleh Camat Banyuwangi karena beliau juga berpendapat sama dengan Goenawan bahwa minat baca di kalangan anak-anak dan remaja dirasa sangat kurang. Program ini disetujui oleh Camat Banyuwangi. Melalui program ini, layanan perpustakaan akan didekatkan pada masyarakat, misalnya di alun-alun, taman kota Sri Tanjung, pantai boom, atau di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi.

Pedoman dalam program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kecamatan Banyuwangi menyediakan 2 mobil yang beroperasi secara bergantian pada hari Senin sampai Jumat di tempat yang telah ditentukan dan setiap tempat mendapatkan jadwal tiga kali dalam seminggu mulai dari jam 12.00 sampai dengan 15.00 karena pada jam-jam tersebut waktunya anak sekolah atau pekerja beristirahat dan pulang. Seharusnya program ini dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, namun karena waktu yang terbatas serta personel dan akomodasi yang minim, maka program perpustakaan keliling hanya dilakukan di kelurahan yang berada di Banyuwangi kota, yakni Kelurahan Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, Karangrejo, dan Kertosari.

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Sebenarnya program peningkatan minat baca melalui perpustakaan keliling tidak direncanakan dalam program Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun karena adanya situasi dan kondisi tertentu yakni masih tersisanya banyak dana di akhir tahun dan karena *implementor* yakni Goenawan selaku Kepala bidang sosial dan budaya Kecamatan

Banyuwangi melihat masih rendahnya minat baca di masyarakat terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang ada di Kecamatan Banyuwangi, maka keluarlah ide program perpustakaan keliling ini. Dalam implementasi kebijakan publik hal ini dinamakan diskresi.

Lukman (dalam Ridwan, 2006:177) menjelaskan bahwa “diskresi adalah sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Terkait dengan pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari program. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, situasi, dan kondisi yang dialami pelaksana program dapat merubah teknis penerapannya”. Jones (1991:295) mengungkapkan mengenai masalah yang dihadapi *implementor* kebijakan atau program, berikut kutipan pernyataanya.

“Banyak konflik dan dilema yang tak terpecahkan turut menyumbang pada kualitas dan dinamika dan interaksi dari penerapan, dalam kenyataannya tujuan-tujuan program mungkin akan mengungkapkan atau secara substansial mengubah proses penerapannya”.

Berkaitan dengan permasalahan yang mungkin muncul dalam sebuah implementasi program, maka diberikanlah kewenangan kepada pelaksana program (*implementator*) untuk melaksanakan program dengan berorientasi kepada tujuan. Soenarko (2003:193) menjelaskan bahwa isi dari suatu kebijaksanaan pemerintah lebih bersifat menentukan pelaksanaannya. Isi kebijakan yang luas akan meliputi keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, baik geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan kondisi tersebut dibutuhkanlah kewenangan untuk mengatur pelaksanaan dengan disesuaikan kepada tujuan kebijakan. Berikut ini kutipan penjelasan Soenarko (2003:194) terkait pelaksanaan kebijakan.

“Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan kebijakan itu diberikan kewenangan kepada pelaksana untuk menyesuaikan kegiatan, cara ataupun sarana serta membuat keputusan-keputusan baru mengenai kebijakan, untuk tercapainya tujuan kebijakan, ialah yang disebut *discretion* dalam *policy implementation*.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskresi diberikan kepada pihak pelaksana dengan lebih menekankan kepada usahanya mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Keleluasaan tersebut adalah menyesuaikan pelaksanaan suatu program dengan lingkungan masyarakatnya. Terkait penggunaan keleluasaan, dijelaskan oleh Ridwan (2006:235) bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah atas dasar *freies ermessen* kemudian melahirkan kebijaksanaan dengan menggunakan perjanjian. Pemerintah dapat menjadikan kewenangannya luas atau kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai objek dalam perjanjian tersebut.

Bentuk diskresi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti bentuk *diskresi in social planning*. Bahwa dengan kompleksnya permasalahan masyarakat pada saat program dilaksanakan, memungkinkan pelaksana program yakni pegawai kantor Kecamatan Banyuwangi khususnya Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi berinisiatif membuat program perpustakaan keliling ketika menjelang akhir tahun karena anggaran Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 masih banyak. Alasan Goenawan mencanakan program ini karena melihat rendahnya minat baca di masyarakat terutama anak-anak dan remaja karena mereka lebih gemar melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013”**.

1.2. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan haruslah mengandung suatu permasalahan, karena dalam suatu permasalahan itu akan kita ketahui apa yang harus peneliti lakukan nantinya. Nawawi (1998:42) menyatakan bahwa masalah dapat pula muncul karena keragu-raguan tentang sesuatu sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam. Kecamatan Banyuwangi sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di Kecamatan Banyuwangi bertugas untuk

menyelenggarakan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat Kecamatan Banyuwangi. Tugas ini mendorong pihak Kecamatan Banyuwangi untuk berinisiatif membuat keputusan-keputusan dalam implementasi program atau kebijakan tertentu.

Keputusan-keputusan yang menyimpang dari prosedur ini berlaku jika memang terdapat kewenangan yang dimiliki atau diskresi bagi pelaksana program atau kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Menurut Subana, 2001:71 "Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalah". Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten banyuwangi Tahun 2013.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis.

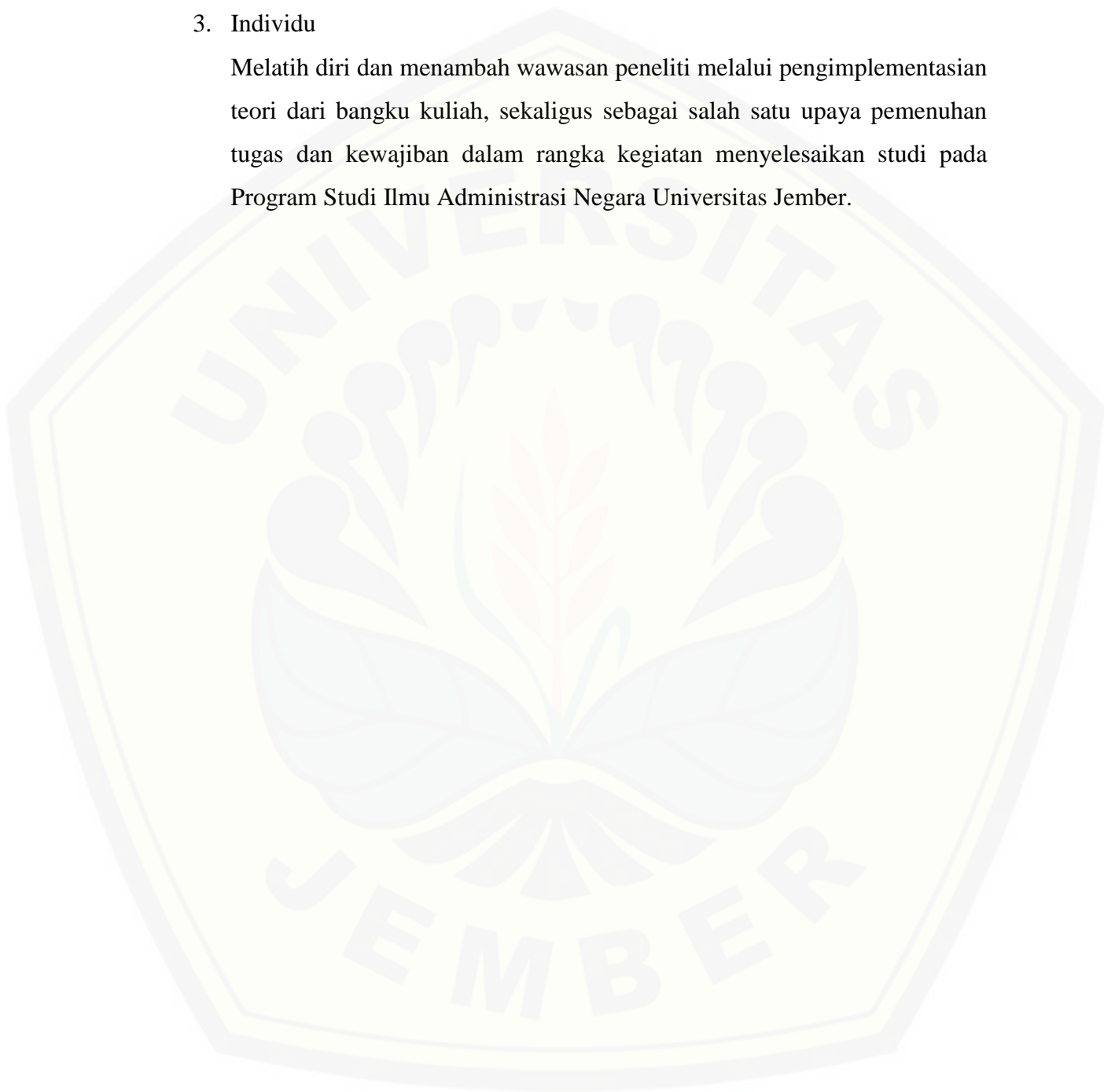
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan studi implementasi program rencana kerja dan bahan kepustakaan bagi mahasiswa khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi dalam merencanakan rencana kerja kecamatan selanjutnya yang lebih tepat dengan harapan dan kondisi masyarakatnya.

3. Individu

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori dari bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Menurut Soenarko (2000:35), kata *Public Policy*, sebenarnya belum mendapatkan arti yang tepat di Indonesia dan ada beberapa ahli yang memperdebatkan tetapi ada juga beberapa ahli yang tidak terlalu mengindahkan arti kata *public policy* namun bagi mereka yang penting tetap berpegang pada esensi “*public policy*” itu sendiri dan salah satu cara yang efektif untuk memahami kebijakan public adalah dengan memahami aneka definisi *public policy*.

Dalam buku berjudul “*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*” oleh Islamy, *public policy* diartikan sebagai kabijaksanaan Negara dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide-ide tentang arti kata *Public Policy*. Sama halnya dengan arti dari *public policy*, pengertian dari kata tersebut juga berbeda-beda. Diantaranya adalah menurut Mustopadidjaja (2003:5) *public policy* diartikan sebagai berikut.

“Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan”.

Menurut Anderson kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007:18). Sehingga menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni sebagai berikut.

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan bukan pada perilaku serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup satu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus (Winarno, 2007:20-21).

Menurut Winarno (2007:32-34), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan-tahapan kebijakan akan diuraikan di bawah ini.

1. *Pertama*, pada tahap penyusunan agenda ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. *Kedua*, pada tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Dalam tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap

ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. *Ketiga*, tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. *Keempat*, pada tahap implementasi kebijakan ini sebuah program kebijakan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. *Kelima*, tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari tahap-tahap kebijakan publik yang telah dipaparkan sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan pemerintah haruslah baik, atau karena keinginan, pendapat dan kehendak dalam masyarakat itu berbeda-beda, maka pengambilan keputusannya haruslah sebaik mungkin. Yang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat (*public interest*). Karena memang pemerintah itu mendapat kekuasaan dari rakyat, pada gilirannya pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Seperti apa yang diungkapkan Laswell dan Kaplan (dalam Subarsono, 2005:3) bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-

praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konsep kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini karena program kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang ada di tataran kecamatan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi Kecamatan Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Selanjutnya menurut Wibawa yang dikutip Koryati, dkk, (2004:10) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan:

“Pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.”

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip Wahab (2008:65) juga menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari definisi yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas maka dapatlah dijelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pada dasarnya kebijakan negara atau publik akan selalu mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn yang dikutip Wahab (2008:61-62) membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori berikut ini.

1. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan).
Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hari, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
2. *Unsuccessful Implementation* (implementasi yang tidak berhasil).
Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Merse (Sunggono, dalam Koryati, dkk, 2004:14-16) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Isu Kebijakan

Kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders.

3. Dukungan

Dalam hal ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang dimaksud adalah adanya partisipasi masyarakat. Program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2008:63), ada tiga sudut pandang proses implementasi sebagai berikut.

1. Pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan (*the center/pusat*)

Fokus implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat ditingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*)

Fokus implementasi kebijakan adalah pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru.

3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*)

Yakni sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, mengubah pola hidup masyarakat dan juga pendapatan.

Pada dasarnya implementasi kebijakan harus berjalan efektif agar penerima kebijakan dapat merasakan sesungguhnya dampak dari adanya suatu kebijakan tersebut. Menurut Nugroho (2006:137-139) bahwa dalam hal keefektifan implementasi kebijakan terdapat empat ketepatan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kebijakan tersebut apakah sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan bukan hanya pemerintah, melainkan terdapat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta.

3. Tepat target

Menurut Nugroho (2006:138) ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan. Menurut Nugroho (2006:139) yang pertama adalah lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan; serta *individuals*,

yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Selain itu implementasi kebijakan harus tepat sasaran agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan

2.2.1.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip Wahab (2008:81) “bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi”. Mazmanian dan Sabatier yang dikutip Wahab (2008:65) juga mengatakan bahwa implementasi kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

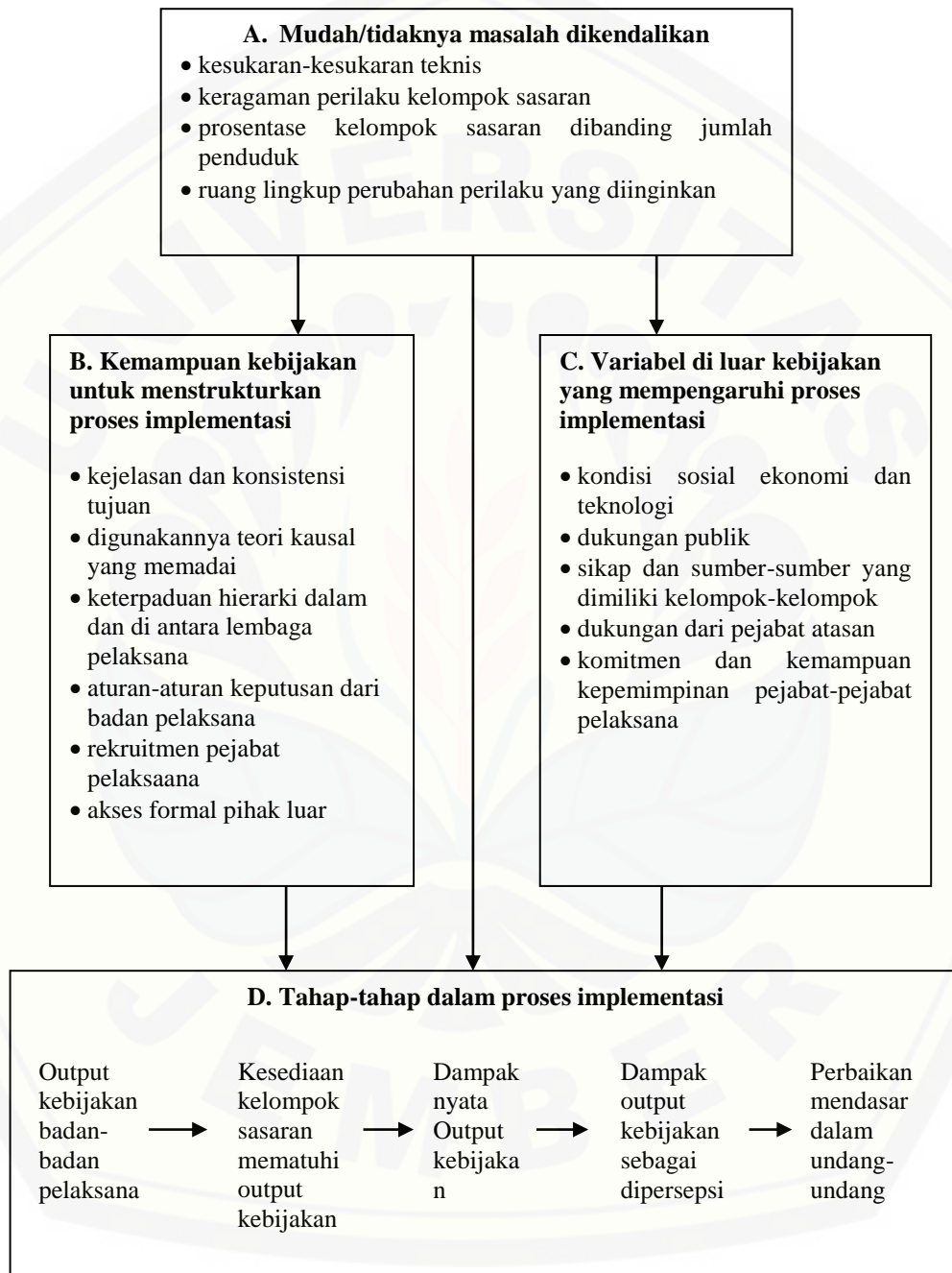
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Model ini disebut juga sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Di sini Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier membagi tiga variabel. Variabel- variabel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.

3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Ketiga variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing faktor dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul a. Sabatier

Sumber: Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip Wahab (2008:82)

Berdasarkan gambar dari model implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier di atas, untuk menjawab bagaimana implementasi yang baik, menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip Nugroho (2006:129) harus melakukan analisis terhadap tiga variabel berikut.

- a) Variabel *independen*, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b) Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- c) Variabel *dependen*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan seperti pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut.

2.2.1.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Menurut Nugroho (2006:132) bahwa dalam model Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan tersebut. Isu kebijakan tersebut meliputi enam hal berikut.

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

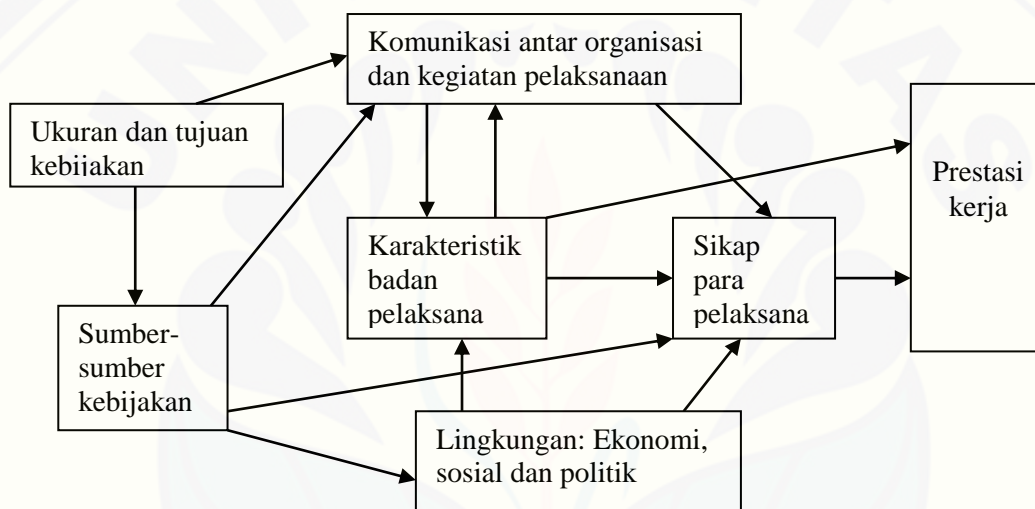
Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

2.2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab (2008:78) menyatakan bahwa, “perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan”. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:80) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
 Sumber: D.S Van Meter dan Van Horn dikutip Wahab (2008:80)

Dalam bagan di atas, terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja, yaitu sebagai berikut

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan merupakan gambaran ke arah mana kebijakan ini nantinya akan membawa perubahan dalam masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:156), identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna

dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2. Sumber-Sumber Kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:158) menerangkan, disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:159-160) menyatakan bahwa implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar kepada para pejabat tinggi untuk mendorong pelaksana bertindak dalam suatu acara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari: *Pertama*, rkruitmen dan seleksi; *Kedua*, penugasan dan relokasi; *Ketiga*, kenaikan pangkat dan; *Keempat*, akhirnya pemecatan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:163) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. kompetisi dan ukuran staf suatu badan;
- b. tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. vitalisasi suatu organisasi;

- e. tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f. kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:164), faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

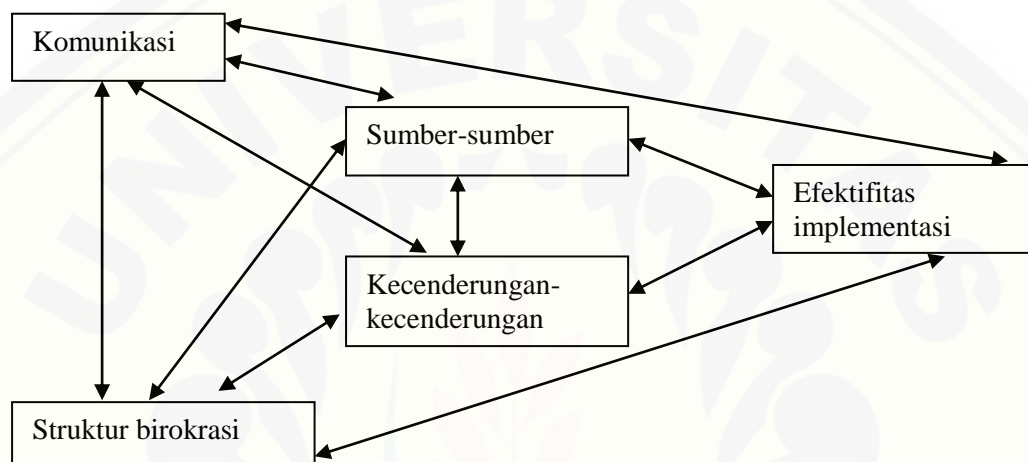
6. Kecenderungan Pelaksana (*implementors*).

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:165) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

2.2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

Menurut pandangan George C. Edwards III yang dikutip Winarno (2007:174) implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, sementara suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward IIISumber: George C. Edwards III dikutip Winarno (2007:208)

Disini George C. Edward III menyebutkan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing faktor dapat kita uraikan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Menurut G. Edwards III yang dikutip Winarno

(2007:175), "persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan". Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Terdapat tiga indikator penting dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu:

a. Transmisi

Menurut Winarno (2007:176) sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan seperti yang diinginkan, maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas. Karena sering kali terjadi instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana sesuatu program dilaksanakan. Menurut Winarno (2007:177) ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah atau bertentangan dengan makna pesan awal.

c. Konsistensi

Menurut Winarno (2007:177) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Disisi yang

lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

2. Sumber-Sumber

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan jelas dan konsisten, tetapi bila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Menurut Winarno (2007:181), sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Indikator sumber-sumber yang dimaksud yaitu:

a. Staf

Menurut Winarno (2007:181) sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal itu berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

b. Informasi.

Menurut Winarno (2007:183-184) dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

- 1). Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberikan petunjuk untuk melakukan kebijakan.

2). Informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menati peraturan tersebut atau tidak.

c. Wewenang.

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Menurut Winarno (2007:185) dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang diatas kertas sering kali salah dimengerti oleh pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang substansial.

d. Fasilitas-fasilitas.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukan, dan memiliki wewenang melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Menurut Edward yang dikutip Winarno (2007:194) dampak dari kecenderungan-kecenderungan banyak kebijakan masuk kedalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun

kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut Winarno (2002:149) birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Sistem birokrasi kadang kala memang sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintah, tetapi bisa juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward ada dua karakter utama dalam birokrasi, yakni:

a. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Menurut Winarno (2007:204), salah satu aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standart Operating Procedures, SOP*). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi.

Kemudian menurut Winarno (2007:206), konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Menurut Winarno (2007:207), Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini

menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil, yaitu:

- a. tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang terpecah-pecah;
- b. pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan yang dapat menghambat perubahan.

Konsep implementasi kebijakan digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini, penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Alasan penggunaan model Van Meter dan Van Horn adalah variabel-variabel yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan pelaksana (*implementors*) dapat menjelaskan proses Implementasi Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam model tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu, indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan

Dari penjelasan tersebut, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dapat dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara semena-mena. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan pemerintah itu barulah ada artinya, bila pelaksanaan kebijakan itu dilakukan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya

untuk kepentingan bersama. Sehingga proses pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijakan itu, karena penerapan kebijakan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula.

2.3. Diskresi Pelaksana Program

Dalam sebuah praktik penyelenggaraan pemerintahan, Ridwan (2006:180) menjelaskan bahwa diskresi (*freies ermessen*) dapat dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Hal ini didukung dengan pendapat mustafa (dalam Ridwan, 2006:178) menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa *freies ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, berada dengan fungsi kehakiman yang menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian sasarnya daripada sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Senada dengan definisi tersebut, Lukman (dalam Ridwan, 2006:177) memberikan pengertian diskresi merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Terkait dengan pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari program. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, situasi, dan kondisi yang dialami pelaksana program dapat merubah teknis penerapannya. Jones (1991:295) mengungkapkan mengenai masalah yang dihadapi implementor kebijakan atau program, berikut kutipan pernyataanya.

“Banyak konflik dan dilema yang tak terpecahkan turut menyumbang pada kualitas dan dinamika dan interaksi dari penerapan, dalam kenyataannya tujuan-tujuan program mungkin akan mengungkapkan atau secara substansial mengubah proses penerapannya”.

Berkaitan dengan permasalahan yang mungkin muncul dalam sebuah implementasi program, maka diberikanlah kewenangan kepada pelaksana program (*implementator*) untuk melaksanakan program dengan berorientasi kepada tujuan. Soenarko (2003:193) menjelaskan bahwa isi dari suatu

kebijaksanaan pemerintah lebih bersifat menentukan pelaksanaannya. Isi kebijakan yang luas akan meliputi keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, baik geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan kondisi tersebut dibutuhkanlah kewenangan untuk mengatur pelaksanaan dengan disesuaikan kepada tujuan kebijakan. Berikut ini kutipan penjelasan Soenarko (2003:194) terkait pelaksanaan kebijakan.

“Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan kebijakan itu diberikan kewenangan kepada pelaksana untuk menyesuaikan kegiatan, cara ataupun sarana serta membuat keputusan-keputusan baru mengenai kebijakan, untuk tercapainya tujuan kebijakan, ialah yang disebut *discretion* dalam *policy implementation*.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskresi diberikan kepada pihak pelaksana dengan lebih menekankan kepada usahanya mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Keleluasaan tersebut adalah menyesuaikan pelaksanaan suatu program dengan lingkungan masyarakatnya. Terkait penggunaan keleluasaan, dijelaskan oleh Ridwan (2006:235) bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah atas dasar *freies ermessen* kemudian melahirkan kebijaksanaan dengan menggunakan perjanjian. Pemerintah dapat menjadikan kewenangannya luas atau kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya Mass dan Radway (dalam Soenarko, 2000:194) menjelaskan bahwa ada tiga macam kewenangan atau keleluasaan yang diberikan kepada pelaksana-pelaksana kebijakan, baik itu perseorangan atau lembaga pemerintah. Ketiga kewenangan tersebut diantaranya:

a. *Technical Discretion*

Kelonggaran teknis ini memberikan kesempatan kepada pelaksana kebijakan untuk merubah cara atau alat-alat yang seharusnya dengan cara atau alat-alat yang sesuai dengan keadaanya, sehingga memungkinkan dan memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaannya

b. *Discretion in sosial planning*

Kewenangan ini memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam program

kebijaksanaan serta membuat suatu rencana sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu akan mendapat sambutan masyarakat sebagaimana mestinya.

c. *Discretion in reconciliation of interests*

Kelonggaran atau kekuasaan ini menghendaki agar pelaksana dalam menghadapi sengketa atau pertentangan kepentingan yang timbul di tengah masyarakat, dapat mengadakan penyelesaian, antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah antara kelompok kekuatan masyarakat (*pressure group*) sehingga terbentuk perpaduan kepentingan, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksana kebijakan.

Bentuk diskresi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti bentuk *diskresi in social planning*. Bahwa dengan kompleksnya permasalahan masyarakat pada saat program diimplementasikan, memungkinkan pelaksana program yakni pegawai kantor Kecamatan Banyuwangi khususnya Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi berinisiatif membuat program perpustakaan keliling ketika menjelang akhir tahun karena anggaran Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 masih banyak yang belum terserap. Alasan Goenawan mencanangkan program ini karena melihat rendahnya minat baca di masyarakat terutama anak-anak dan remaja karena mereka lebih gemar melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

2.4. Program Kerja

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992:45), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*". Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa "kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu". Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang

berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984) dalam <http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf> yang diakses 1 Juli 2014, “program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri”.

Dilansir dari <http://www.geocities.ws/bukukmhd/bpo23.html> tanggal 1 Juli 2014 Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi. Ada dua alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi:

1. Efisiensi organisasi.

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

2. Efektifitas organisasi.

Keefektifan Organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya .

Program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis-jenis program kerja dapat dibedakan antara lain.

1. Menurut rentang waktu perencanaan.
 - a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan.

Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan.

b. Program kerja untuk waktu tertentu.

Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester dan lain lain. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini maka akan ditemui bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.

2. Menurut sifat program kerja.

a. Program kerja yang bersifat terus menerus (*continue*).

Program kerja seperti ini akan dilakukan secara terus menerus (tidak hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali melaksanakan jenis program kerja ini.

b. Program kerja yang bersifat insidental.

Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu oleh suatu organisasi biasanya mengambil momentum momentum waktu yang penting.

c. Program kerja yang bersifat tentatif.

Program kerja ini sifatnya akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang akan datang. Alasan dibuatnya program kerja jenis ini adalah karena kurang terjaminnya faktor faktor pendukung ketika diadakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain .

3. Menurut targetan organisasi

a. Program kerja jangka panjang

Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. Program kerja

model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan dalam waktu yang pendek tidak memungkinkan.

c. Program kerja jangka pendek.

Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara 1-3 tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini, dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat.

Teori program kerja akan digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Jadi program kerja merupakan objek utama penelitian ini.

2.5. Proyek

Dalam <http://manajemenproyek.ac.id> yang diakses tanggal 3 Juli 2014 Proyek adalah suatu hal yang kompleks, tidak rutin, usahanya dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya dan spesifikasi kinerja yang didesign untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada dasarnya tujuan manajemen proyek ada dua yaitu:

1. tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan (Proyek-proyek yang berorientasi keuntungan terkait dengan perusahaan, jasa dan properti);
2. bersifat sosial benefit. (Proyek-proyek yang bergerak pada sektor publik atau pemerintahan).

Dalam sebuah proyek dikenal adanya manajemen proyek, manajemen proyek merupakan sebuah model untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan operasionalisasi proyek. Kesuksesan proyek ini didukung dengan 3 variabel yaitu :

- a. *Implementataion Process*, yakni kesuksesan operasionalisasi proyek yang diukur dengan menggunakan variabel jadwal, anggaran, dan kepuasan pelanggan.
- b. *Perceived Value Of Project*, yakni persepsi manfaat proyek yang diukur dengan menggunakan variabel pemecahan

masalah bagi pelanggan, peningkatan pengambilan keputusan, pengaruh positif, dan peningkatan aktivitas.

- c. *Client satisfaction*, yakni kepuasan pelanggan yang diukur dengan variabel pelaksanaan proyek, penggunaan oleh pelanggan, dan manfaat pelanggan.

Dalam pelaksanaan sebuah proyek tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan karena kegagalan sering kali terjadi. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek menurut Suhartono dalam www.proyeksukses.com yang diakses 2 Juli 2014, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Misi Proyek.

Berupa penentuan tujuan utama proyek dan menentukan arahan serta aturan umum yang akan digunakan dalam operasionalisasi proyek yang bertujuan memberikan penjelasan kepada seluruh tim anggota proyek yang terlibat dalam operasional proyek.

2. Dukungan Top Manajemen.

Berupa kesediaan untuk menyediakan sumber daya dan wewenang demi kesuksesan proyek, karena top manajemen berperan sebagai tutor dan fasilitator dalam mengimplementasikan rencana terhadap tujuan organisasi yang Top manajemen mempunyai komitmen terhadap kesuksesan proyek.

3. Rencana Proyek.

Penjadwalan dan rencana kerja yang berupa uraian rincian tentang spesifikasi keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan serta rencana kerja rinci dari tahap ke tahap dalam operasional proyek

4. Konsultasi dengan pelanggan

Memberikan gambaran hasil yang dibutuhkan oleh pelanggan yang akan menjadi pemakai hasil proyek yang bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek.

5. Pelaksana.

Merupakan suatu peran yang menentukan keberhasilan suatu proyek yang bertujuan untuk melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja sesuai dengan keterampilan pelaksanaan proyek.

6. Tugas-tugas teknis.

Ketersediaan peralatan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek.

7. Kepercayaan Pelanggan.

Merupakan kesediaan menerima terhadap hasil kerja proyek

8. Pengawasan dan umpan balik.

Merupakan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktifitas disetiap tahapan proyek dalam operasionalisasi proyek.

9. Komunikasi.

Interaksi informasi dan data terkini untuk seluruh pelaku dalam operasional proyek.

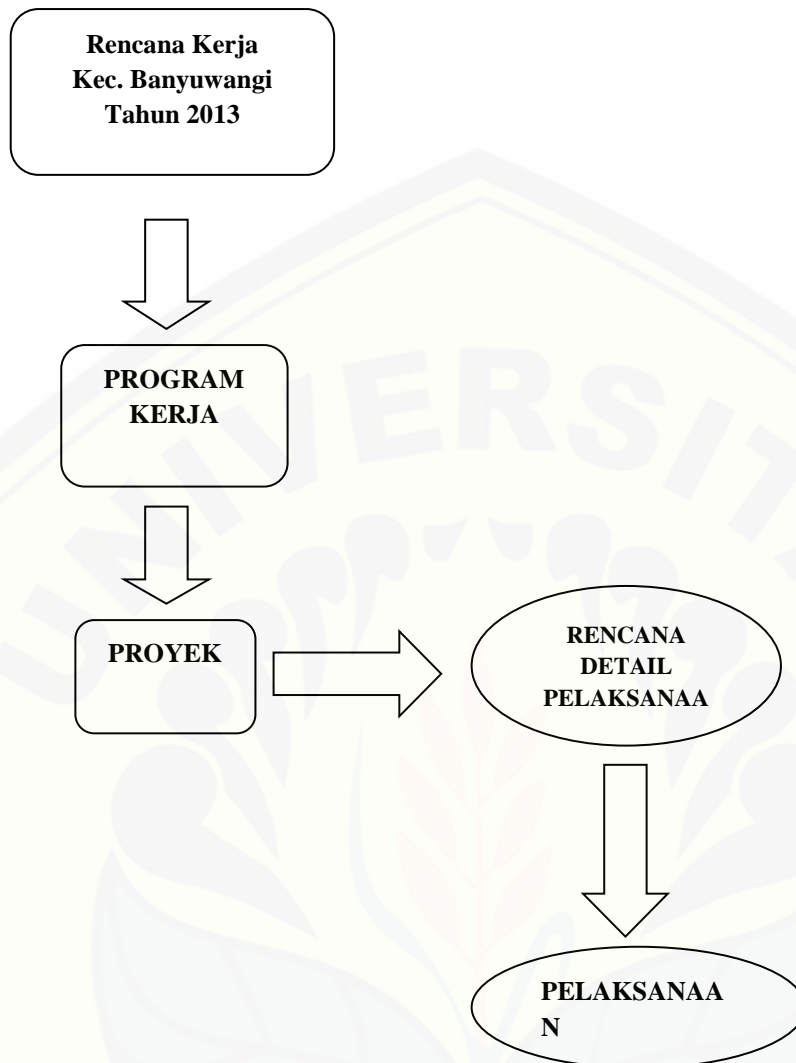
10. Pemecahan Masalah.

Kemampuan untuk menangani keadaan kritis yang tidak diharapkan.

Teori proyek akan digunakan dalam penelitian karena untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan pada tahun tertentu, pemerintah membuat sebuah proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rencana kerja tersebut.

2.6. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar lebih memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.6. Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Pembatasan pada penelitian sangat diperlukan untuk memudahkan pemahaman bagi pembacanya mengenai penelitian yang dilakukan. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:38) disebut fokus. Dengan adanya fokus, maka peneliti akan dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data, sehingga dapat diketahui mana data yang diperlukan dalam penelitian dan mana yang tidak diperlukan. Fokus dalam penelitian ini adalah program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui perpustakaan keliling karena program ini tidak terdapat dalam Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 namun dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 ada.

3.2. Tipe dan Jenis Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan jenis deskriptif. Berdasarkan datanya, tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Definisi metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) adalah sebagai berikut.

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.”

Sedangkan jenis penelitian deskriptif menurut Faisal (2005:20), “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sejumlah gejala atau kejadian yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti”. Penggunaan tipe kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah peneliti

berusaha mengungkapkan apa adanya mengenai fakta yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. Data yang berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penjas dan penegas saja.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang ada di Jalan Jendral A. Yani Nomor 101 Banyuwangi.

3.4. Penentuan Informan

Menurut Moleong (2007:132), "informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian". Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba (Moleong, 2007:132) menyatakan, "kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi."

Dalam menetapkan seorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Dengan demikian akan mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2007:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. "Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai *pegawai* lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.”

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud di sini ialah orang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, sehingga hal tersebut dapat memudahkan penulis untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa unsur informan kunci yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* sebagai berikut.

1. Camat Banyuwangi (Abdul Aziz Hamidi, SE, MM).
2. Kepala bagian umum dan kepegawaian (Khasanah, SE).

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dengan metode *purposive sampling* dianggap penulis belum cukup memberikan informasi yang relevan, maka dari itu penulis kemudian menentukan informan pendukung yang dipilih dengan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2008:219) menjelaskan bahwa Teknik *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang mula-mula jumlahnya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar. Artinya, dalam penentuan sampel (informan) pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan jumlah orang tersebut diperkirakan belum lengkap memberikan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan semakin banyak. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang diperlukan sehingga didapatkan data yang lengkap, akurat serta keragaman informasi guna kejelasan informasi itu sendiri.

3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah

diolah sehingga peneliti tinggal menyalin data itu saja. Agar data ini dapat diperoleh, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan di bawah ini.

1. Wawancara.

Menurut Moleong (2007:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan maksud wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2007;186) adalah sebagai berikut.

1. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.
2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.
3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami pada masa-masa yang akan datang.
4. Menverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*).
5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responden untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat interview guide sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak menyimpang dari topik yang di bicarakan.

2. Dokumentasi.

Hal ini berarti penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang akan di pakai adalah kliping-kliping, surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tertulis yang muncul di media massa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

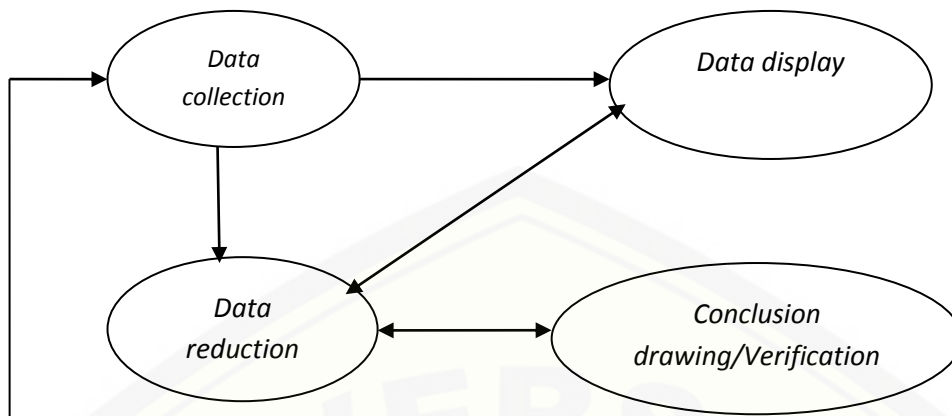
3. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur yang relevan dengan bahasan penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah segenap rangkaian pembuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat (The Liang Gie, 1984:65). Metode analisa data memberikan uraian tentang bagaimana mengolah data dari awal. Data mentah yang telah didapat kemudian secara sistematis diurutkan sehingga sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, 1984 (disitir dari Sugiyono, 2008:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan huberman (1992:16) menjelaskan bahwa model analisis interaktif terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing or verification*). Miles dan Huberman (1992:20) menggambarannya sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, 1984 (disitir dari Sugiyono, 2008:246)

Model analisis interaktif terdiri dari aktivitas atau kegiatan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data. Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.
2. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila itu diperlukan.
3. Penyajian data. Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7. Uji Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2007:324) menyatakan bahwa "untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu drajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)".

Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2007:330) "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip oleh Moleong, 2007:330).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Kota Banyuwangi adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan merupakan ibukota kabupaten. Posisinya sebagai ibukota kabupaten menjadikan banyaknya gedung-gedung pemerintahan, cabang-cabang perusahaan, dan pusat keramaian yang berdiri di wilayah ini. Kecamatan Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ} 43'$ – $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ – $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalipuro, sebelah timur berbataaan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabat, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Glagah. Luas wilayah Kecamatan Banyuwangi 30,13 km², terbagi menjadi 18 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kampung Mandar
2. Kelurahan Kampung Melayu
3. Kelurahan Kebalenan
4. Kelurahan Kepatihan
5. Kelurahan Kertosari
6. Kelurahan Lateng
7. Kelurahan Pakis
8. Kelurahan Panderejo
9. Kelurahan Penganjuran
10. Kelurahan Pengantigan
11. Kelurahan Singonegaraan
12. Kelurahan Singotrunan
13. Kelurahan Sobo
14. Kelurahan Sumber Rejo
15. Kelurahan Taman Baru

16. Kelurahan Temenggungan

17. Kelurahan Tukang Kayu

18. Kelurahan Karangrejo

Kondisi iklim di Kecamatan Banyuwangi memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan durasi yang berbeda-beda setiap tahun. Rata-rata durasi waktu musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan, namun demikian secara umum perbedaan durasi waktu antara musim kemarau dan penghujan tidak membawa dampak yang berarti terutama bagi sektor pertanian di Kecamatan Banyuwangi. Rata-rata curah hujan selama setahun angkanya berkisar antara 5 mm – 15 mm terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juni. Sedang bulan Juli sampai dengan Desember angkanya berkisar antara 1 mm – 18 mm. Sepanjang tahun rata-rata suhu udara terendah biasanya terjadi pada bulan Juli yaitu pada kisaran 25,0 derajat celcius.. sedang tertinggi pada bulan November pada kisaran 28,4 derajat celcius. Sedangkan pada bulan-bulan lain angka rata-rata suhu udara yang terjadi pada kisaran 27 derajat celcius. Dan pada bulan-bulan lain angka rata-rata suhu udara sekitar 26 derajat celcius.

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Banyuwangi sebanyak 106.000 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 52.040 orang, dan penduduk perempuan sebanyak 53960 orang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat bahwa penduduk terbanyak berada di Kelurahan Kertosari sebesar 8.223 orang, kemudian diikuti oleh Kelurahan Pengantigan sebesar 7.991 orang, dan Kecamatan Singotrunan sebesar 7.655 orang. Dengan luas wilayah Kecamatan Banyuwangi sekitar 30,13 km² yang didiami oleh 106.000 orang, dan tingkat prosentase terhadap luas Kabupaten sebesar 0,5 persen, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Banyuwangi, yakni sebanyak 3.518 orang per km². Mayoritas penduduk Kecamatan Banyuwangi memeluk Agama Islam dengan prosentase 94,26 persen atau sebanyak 100.643 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah, jumlah

penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk per- Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Penduduk Per- Kelurahan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Pakis.	401,13	4416	11
2.	Sobo.	398,6	7613	19
3.	Kabalenan.	243,87	7372	30
4.	Penganjuran.	111	5494	49
5.	Tukangkayu.	116,05	8471	73
6.	Kertosari.	293,49	6474	22
7.	Karangrejo.	144,64	9400	65
8.	Kepatihan.	31,11	4461	143
9.	Panderejo.	22,71	4159	183
10.	Singonegaran.	68,96	5207	76
11.	Temenggungan.	8,41	2298	273
12.	Kampung	11,77	3065	260
13.	Melayu.	10,09	3679	365
14.	Kampung	79,05	8049	102
15.	Mnadar.	97,55	8612	88
16.	Lateng.	150,53	5950	39
17.	Singotrunan.	253,96	4873	19
18.	Pengantigan. Sumberejo. Tamanbaru.	90,82	7304	80
	Jumlah	2.533,74	106.797	42

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

4.1.3 Ekonomi

Kondisi ekonomi di Kecamatan Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari banyak berkembangnya sektor-sektor usaha baik itu industri, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Tentu saja semakin banyak populasi usaha yang berdiri, maka sebuah daerah akan semakin maju dan meningkat. Jumlah usaha yang dicatat melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi berjumlah 16.486 usaha. Berikut tabel jumlah usaha menurut sektor kegiatan usaha.

Tabel 4.2 Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha

No	Sektor Kegiatan Usaha	Jumlah
1	Pertambangan dan Penggalian	7
2	Industri Pengolahan	1.375
3	Listrik, Gas dan Air	2
4	Konstruksi	88
5	Perdagangan Besar dan Eceran	6.537
6	Akomodasi Makan Minum	2.818
7	Transport, Gudang, dan Komunikasi	2.296
8	Perantara Keuangan	113
9	Real Estate dan Persewaan	647
10	Jasa Pendidikan	196
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114
12	Jasa Kemasy-Sosbud, Hib-Perorangan	1.862
13	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	432
	Jumlah Total	16.486

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Dapat diperhatikan bahwa berdasarkan sektor kegiatan usahanya, diperoleh data yang bergerak di sektor perdagangan baik besar maupun eceran merupakan sektor ekonomi yang paling diminati oleh para pelaku usaha di Kecamatan Banyuwangi yang jumlahnya 16.486 usaha dari keseluruhan usaha yang ada. Kemudian diikuti oleh usaha akomodasi makan dan minum, dan usaha

transport, gudang dan komunikasi, lalu yang terendah adalah usaha listrik, gas dan air yang hanya berjumlah 2 pelaku usaha saja.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang Implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, maka peneliti melakukan wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Sebenarnya program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun dalam LAKIP terdapat program ini. Dalam implementasi kebijakan publik, hal ini disebut sebagai diskresi program. Lukman (dalam Ridwan, 2006:177) memberikan pengertian diskresi merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Terkait dengan pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari program. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, situasi, dan kondisi yang dialami pelaksana program dapat merubah teknis penerapannya. Berkaitan dengan permasalahan yang mungkin muncul dalam sebuah implementasi program, maka diberikanlah kewenangan kepada pelaksana program (*implementator*) untuk melaksanakan program dengan berorientasi kepada tujuan. Soenarko (2003:193) menjelaskan bahwa isi dari suatu kebijaksanaan pemerintah lebih bersifat menentukan pelaksanaannya. Isi kebijakan yang luas akan meliputi keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, baik geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan kondisi tersebut dibutuhkanlah kewenangan untuk mengatur pelaksanaan dengan disesuaikan kepada tujuan kebijakan. Berikut ini kutipan penjelasan Soenarko (2003:194) terkait pelaksanaan kebijakan.

“Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan kebijakan itu diberikan kewenangan kepada pelaksana untuk menyesuaikan kegiatan, cara ataupun sarana serta membuat keputusan-keputusan baru mengenai kebijakan, untuk tercapainya tujuan

kebijakan, ialah yang disebut *discretion* dalam *policy implementation*.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskresi diberikan kepada pihak pelaksana dengan lebih menekankan kepada usahanya mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau program. Keleluasaan tersebut adalah menyesuaikan pelaksanaan suatu program dengan lingkungan masyarakatnya. Terkait penggunaan keleluasaan, dijelaskan oleh Ridwan (2006:235) bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah atas dasar *freies ermessen* kemudian melahirkan kebijaksanaan dengan menggunakan perjanjian. Pemerintah dapat menjadikan kewenangannya luas atau kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya Mass dan Radway (dalam Soenarko, 2000:194) menjelaskan bahwa ada tiga macam kewenangan atau keleluasaan yang diberikan kepada pelaksana-pelaksana kebijakan, baik itu perseorangan atau lembaga pemerintah. Ketiga kewenangan tersebut diantaranya:

d. *Technical Discretion*

Kelonggaran teknis ini memberikan kesempatan kepada pelaksana kebijakan untuk merubah cara atau alat-alat yang seharusnya dengan cara atau alat-alat yang sesuai dengan keadaanya, sehingga memungkinkan dan memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaannya

e. *Discretion in sosial planning*

Kewenangan ini memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam program kebijaksanaan serta membuat suatu rencana sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu akan mendapat sambutan masyarakat sebagaimana mestinya.

f. *Discretion in reconciliation of interests*

Kelonggaran atau kekuasaan ini menghendaki agar pelaksana dalam menghadapi sengketa atau pertentangan kepentingan yang timbul di

tengah masyarakat, dapat mengadakan penyelesaian, antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah antara kelompok kekuatan masyarakat (*pressure group*) sehingga terbentuk perpaduan kepentingan, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksana kebijakan.

Bentuk diskresi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti bentuk *diskresi in social planning*. Bahwa dengan kompleksnya permasalahan masyarakat pada saat program diimplementasikan, memungkinkan pelaksana program yakni pegawai kantor Kecamatan Banyuwangi khususnya Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi berinisiatif membuat program perpustakaan keliling ketika menjelang akhir tahun karena anggaran Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 masih banyak yang belum terserap. Alasan Goenawan mencanangkan program ini karena melihat rendahnya minat baca di masyarakat terutama anak-anak dan remaja karena mereka lebih gemar melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Adapun variabel-variabel atau faktor-faktor yang terdapat dalam model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn terdiri dari:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber-Sumber Kebijakan.
3. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.
4. Karakteristik Badan Pelaksana.
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.
6. Kecenderungan Pelaksana (*implementors*).

Keenam faktor di atas yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam kerangka seluruh proses yang ada dalam program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Berdasarkan variabel-variabel atau faktor-faktor di atas dan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan analisa sebagai berikut.

4.2.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hal ini berkaitan dengan ukuran dasar dari implementasi program perpustakaan keliling. Ukuran dasar yang digunakan atau sebagai pedoman dalam program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Dan tujuan diimplementasikannya program perpustakaan keliling adalah untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuwangi terutama pada anak-anak dan remaja karena saat itu mereka cenderung lebih senang melihat televisi dan internet daripada membaca buku.

Untuk membuktikan hasil studi dokumentasi dan studi pustaka di atas, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Camat Banyuwangi (Abdul Aziz), menyatakan bahwa:

“ukuran dasar dari program ini ya Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling kepada petugas yang diberi mandat. Tujuan diadakannya program ini karena inisiatif dari Bapak Goenawan untuk meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak dan remaja utamanya”
(*Jumat, 17 Oktober 2014*)”

Ukuran dan tujuan implementasi program perpustakaan keliling ini memang sudah jelas dan telah dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan tersebut. Hal senada juga dinyatakan oleh Sujiati selaku Sekretaris Kecamatan Banyuwangi menyatakan bahwa.

“Kalau masalah ukuran dasar itu menyangkut tentang perintah dari bapak Camat untuk implementasi program perpustakaan keliling lewat Surat Perintah Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuwangi utamanya pada anak-anak dan remaja karena sangat jarang

anak-anak dan remaja yang saat ini senang membaca”(*Jumat, 17 Oktober 2014*).

Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) dengan Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Kecamatan Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

“Saya kira sudah jelas bahwa ukuran dasarnya adalah surat perintah Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 untuk melaksanakan program perpustakaan keliling. Dan tujuan dari program ini adalah diharapkan dapat meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuwangi utamanya pada anak-anak dan remaja yang sangat jarang membaca buku karena mereka lebih senang melihat televisi atau bermain *game*” (*Jumat, 17 Oktober 2014*).

Kemudian apakah ukuran dan tujuan kebijakan itu benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat penerima kebijakan dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Banyuwangi . Untuk itu peneliti mengkosceknnya ke Saraswati salah satu siswa SMA Negeri di Kecamatan Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

“Awalnya saya senang sekali dengan program perpustakaan keliling ini, namun hanya berlangsung sebentar program ini ya kira-kira tiga bulanan. Buku-buku yang ada juga kurang *update* sehingga malas juga mau masuk perpus itu” (*22 Oktober 2014*).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Diana selaku salah satu warga masyarakat Kecamatan Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

“Saya malah tidak pernah tahu kalau di Kecamatan Banyuwangi pernah ada program perpustakaan keliling. Sekalipun saya tidak pernah menjumpai mobil pemerintah yang dijadikan perpustakaan itu.”(*22 Oktober 2014*).

Hal senada juga dinyatakan oleh Ridho salah satu pemuda Kecamatan Banyuwangi berikut ini.

“Malah saya tidak tahu menahu kalau di Kecamatan banyuwangi ada program perpustakaan keliling?.Padahal saya cukup senang membaca, apalagi membaca buku-buku cerita” (*22 Oktober 2014*).

Berdasarkan hasil dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa semua petugas pelaksana kebijakan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 memahami ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dan penerima kebijakan ini juga tidak semuanya memahami apa yang telah menjadi ukuran dan tujuan dari adanya program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Tujuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Banyuwangi juga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Banyuwangi semuanya karena program ini hanya berjalan sebentar, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya program ini. Bagi pihak pemerintah, program ini tidak terdapat dalam Renja Kecamatan Banyuwangi namun dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi program ini ada, sehingga tidak ada sosialisasi atau koordinasi dengan instansi lain atau masyarakat karena program ini diimplementasikan secara mendadak.

4.2.2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang di maksud adalah mencakup dana, personil, atau perangsang lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Sumber dana yang digunakan dalam Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp 1.846.062.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3. Pagu dan Rincian Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	
	- Belanja Pegawai	Rp 1.438.722.000
2.	Belanja Langsung	
	- Belanja Pegawai	Rp 37.609.000
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 326.128.000
	- Belanja Modal	Rp 43.603.000

Sumber: LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

Realisasi anggaran Kecamatan Banyuwangi per- 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.733.848.050 atau 93,92% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4. Realisasi Anggaran Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung		
	- Belanja Pegawai	Rp 1.360.130.864	94,54
2.	Belanja Langsung		
	- Belanja Pegawai	Rp 34.680.500	92,21
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 296.236.686	90,83
	- Belanja Modal	Rp 42.800.000	98,16

Sumber: LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013

Pada Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 terdapat 7 program, yaitu sebagai berikut.

8. Program pelayanan administrasi perkantoran.
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
10. Program pelayanan publik.
11. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
12. Program perencanaan pembangunan daerah.
13. Program pemeliharaan Kantirantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
14. Program-program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur.

Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran dan realisasi setiap program Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran E. Untuk program pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan mendapatkan anggaran sebesar Rp 13.280.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 11.212.500 yang berarti anggaran yang terserap sebesar 84,43%.

Untuk mengetahui kebenaran dari sumber-sumber kebijakan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Purwanto selaku Kepala Bagian Keuanganyang menyatakan bahwa:

“dana ini adalah dana yang berasal dari APBD, tapi sebenarnya dana ini tidak dianggarkan dalam Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 karena program ini tidak direncanakan, tapi dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 ada”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan dari Siti Fatimah selaku Bendahara Kecamatan Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah danaprogram itu berasal dari APBD, namun sebenarnya program perpustakaan keliling ini tidak ada dalam Renja Kecamatan Banyuwangi setau saya tapi dalam LAKIP ada programnya. Programnya juga hanya berlangsung sekitar tiga bulanan”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) mengenai sumber atau dana kebijakan ini yaitu dengan Bagus Sudartono selaku koordinator program perpustakaan keliling yang menyatakan bahwa:

”ya untuk pembiayaannya, program ini berasal dari dana APBD tahun 2013. Namun dalam Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 program ini tidak ada, tapi di LAKIP ada. Programnya juga hanya berjalan sebentar kurang lebih tiga bulanan”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Pernyataan Bagus Sudartono yang menyatakan bahwa program ini awalnya tidak direncanakan dan hanya berjalan sebentar juga dibenarkan oleh Camat Banyuwangi berikut ini.

“Awalnya program perpustakaan keliling ini memang tidak direncanakan, tapi karena dana Kecamatan Banyuwangi ketika mau ahir tahun masih banyak, maka diadakanlah program ini. Dananya ya murni dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2013”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penggunaan dana program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp 13.280.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 11.212.500 yang berarti anggaran yang terserap sebesar 84,43%. Dana ini digunakan dalam kegiatan perpustakaan keliling, namun kegiatan ini hanya berlangsung selama tiga bulan dan sebenarnya pada Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 program ini tidak ada, namun dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 program ini ada sehingga para pelaksana kegiatan juga bingung dengan hal ini. Nominal dana ini penulis dapatkan dari LAKIP Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 karena informan tidak ada yang bersedia mengatakan jumlah nominalnya.

Berkaitan dengan personel atau tenaga dalam implementasi program perpustakaan keliling ini, peneliti melakukan wawancara dengan Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Kecamatan Banyuwangi yang mengagas program ini. Berikut pernyataan Goenawan:

“personel yang saya tugaskan untuk implementasi program ini ada empat orang yang dibagi menjadi dua kelompok, jadi satu kelompok terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai sopir dan petugas yang mengarahkan pembaca nantinya. Jadi bisa dibilang minim sekali tenaganya, tapi memang begitu adanya karena semua orang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri dan program ini juga mendadak dilakukan jadi personelnnya juga seadanya”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Pernyataan Goenawan juga dibenarkan oleh Bagus Sudartono selaku koordinator program perpustakaan keliling berikut ini.

“karena mendadak programnya, maka hanya ada empat orang yang kami tugaskan untuk menjalankan program ini. Jadi empat orang ini kita bagi menjadi dua tim dan secara otomatis ada dua orang dalam satu tim yang bertugas sebagai sopir dan pelayan masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan kami”(Kamis, 23 Oktober 2014).

Pernyataan Goenawan dan Bagus Sudartono di atas dibenarkan oleh Indah Pratiwi selaku salah satu petugas lapangan perpustakaan keliling berikut ini.

“yang mendapat tugas dari atasan untuk menjalankan program perpustakaan keliling ini ada empat orang, termasuk saya. Empat orang ini dibagi lagi menjadi dua tim, jadi setiap tim terdiri dari dua yang bertugas sebagai sopir dan pendampingnya. Cukup

kuwalahan juga saya jika banyak pengunjunnya, tapi memang personelnya segini ya diterima saja” (Kamis, 23 Oktober 2014).

Dari petikan wawancara di atas, terlihat jelas bahwa personel yang diterjunkan untuk mengimplementasikan program perpustakaan keliling ini sangatlah minim karena programnya mendadak dilakukan, jadi jumlah personel yang diterjunkan adalah pegawai Kecamatan Banyuwangi yang tidak mempunyai tugas yang berat saat itu. Sebenarnya hal ini tidak cukup efektif jumlah personelnya jika banyak pengunjung perpustakaan.

4.2.3. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang terjadi dalam kebijakan Implementasi program pengembangan minat baca melalui perpustakaan keliling adalah koordinasi pembagian tugas antara pegawai pelaksana kegiatan, misalnya dalam penugasan yang dilakukan koordinator kegiatan kepada tenaga lapangan. Selain hal tersebut ada juga komunikasi melalui bentuk kerjasama antar pihak dan juga lembaga yang terkait dengan program ini. Komunikasi tersebut misalnya dalam bentuk kegiatan sosialisasi tentang kapan jadwal perpustakaan keliling ada di tempat yang telah ditentukan, dalam hal ini ada kerjasama antara pihak Kecamatan Banyuwangi (utamanya petugas lapangan) dengan pihak Kelurahan dan Lurah-Lurah yang ada di Kelurahan Kecamatan Banyuwangi. Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa pihak Kecamatan Banyuwangi tidak pernah mengkoordinasikan maupun menginformasikan program perpustakaan keliling kepada Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, sehingga banyak pihak yang tidak tahu adanya program ini. Ada pihak yang tahu, namun mereka tahu saat program ini sedang diimplementasikan.

Untuk membuktikan hal di atas, peneliti melakukan wawancara mendalam mengenai bentuk komunikasi dengan Ibu Betti selaku Lurah Kebalenan yang menyatakan bahwa:

“selama ini tidak ada komunikasi sama sekali antara pihak kecamatan dengan saya maupun pihak kelurahan tentang adanya

program perpustakaan keliling. Bahkan saya tidak tahu jika Kecamatan Banyuwangi mempunyai program ini pada tahun 2013”(Senen 27 Oktober 2014).

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh bapak Imron Rosidiselaku petugas lapangan program perpustakaan keliling yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“kita memang tidak mengkomunikasikan program ini dengan pihak luar, baik itu Lurah maupun pihak Kelurahan. Program ini saja mendadak adanya karena di Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 program ini memang tidak direncanakan”.

Dalam pelaksanaan program ini memang tidak ada komunikasi antar pihak yang terkait, baik itu pihak Kelurahan maupun pihak kecamatan sendiri karena program ini awalnya tidak direncanakan. Untuk mengecek kebenaran informasi, maka peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) yakni dengan Bagus Sudartono yang juga sebagai koordinator kegiatan pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“jadi gini, program perpustakaan keliling ini memang tidak ada di renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun karena ada kelebihan dana yang lumayan cukup besar ketika mau tutup anggaran maka ada inisiatif dari Bapak Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi. Jadi program ini langsung kita lakukan begitu saja tanpa koordinasi dengan pihak luar Kecamatan, baik itu dengan Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi.”

Kemudian untuk melihat apakah benar program ini mendadak dilakukan, peneliti melakukan wawancara kepada Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya di Kecamatan Banyuwangi pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“memang program ini tidak dianggarkan dalam renja Kecamatan banyuwangi tahun 2013, tapi saat mau tutup buku dana masih banyak. Daripada *mubazir* akhirnya saya canangkan program ini begitu saja. Wong Cuma beberapa kali saja program ini ada dan

tidak ada koordinasi dengan pihak luar memang karena ya itu tadi dadakan programnya”

Pernyataan Bagus Sudartono dan Goenawan di atas dibenarkan Abdul Azis selaku Camat Banyuwangi pada tanggal 28 Oktober 2014 berikut ini.

“Dalam pelaksanaan program ini memang tidak ada koordinasi dengan pihak manapun, termasuk Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi karena programnya mendadak sehingga wajar jika tidak banyak pihak yang mengetahui program ini. Dari pengalaman ini, maka bisa kita petik hikmahnya bahwa untuk kesuksesan suatu program maka perlu disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada komunikasi formal maupun informal antara pihak Kecamatan Banyuwangi dengan Lurah maupun pihak Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi tentang program perpustakaan keliling sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui kapan jadwal perpustakaan ini dan apa tujuan yang ingin dicapainya. Malah pihak Kelurahan maupun Lurah ini tahu program ini ketika sudah diimplementasikan, namun tidak semuanya mengetahui.

4.2.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Kecamatan Banyuwangi adalah bagaimana dan unsur apa saja yang mempengaruhi badan tersebut dalam melaksanakan implementasi program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui perpustakaan keliling. Mengenai masalah sosialisasi program yang dilakukan pihak Kecamatan Banyuwangi, peneliti melakukan wawancara dengan Bagus Sudartono selaku koordinator program perpustakaan keliling pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“program perpustakaan keliling ini adalah program *spontan* karena program ini dilakukan begitu saja di akhir tahun karena dana yang tersedia masih banyak. Jadi program ini memang tidak dianggarkan awalnya, sehingga tidak ada sosialisasi maupun koordinasi dengan pihak lain terkait adanya program ini.”

Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh Imron Rosidi selaku tenaga pelaksana program perpustakaan keliling yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“tidak ada sosialisasi apapun terkait adanya program ini karena program ini memang tidak direncanakan oleh pihak Kecamatan Banyuwangi di tahun 2013. Jadi wajar jika banyak pihak yang tidak tahu tentang program ini, saya saja kaget kok ada program ini di penghujung tahun.”

Untuk mengecek kebenaran informasi, maka peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) yakni dengan pihak Kelurahan Tukang Kayu yang peneliti wawancarai pada tanggal 1 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“tidak ada koordinasi ataupun sosialisasi program perpustakaan keliling yang dilakukan pihak Kecamatan Banyuwangi kepada kami. Dan memang program ini setau saya tidak ada dalam renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013”

Hal senada juga dinyatakan oleh Ayub salah satu warga masyarakat Kecamatan Banyuwangi yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Saya tahu program ini satu kali di depan kodim namun sebelum adanya program ini, saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi apapun terkait program perpustakaan keliling.

Pernyataan Lurah tukang Kayu dan Ayub di atas diperkuat dengan pernyataan Camat Banyuwangi yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 November 2014 berikut ini.

“Intinya tidak ada sosialisasi, koordinasi, ataupun hal-hal lain yang mengawali program ini sebelum diimplementasikan karena programnya mendadak. Aslinya program ini tidak ada dalam Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013, namun karena waktu itu dana masih banyak maka digagaslah program ini oleh Goenawan selaku Kepala Bidang Sosial Budaya.

Kemudian hal lain mengenai karakteristik badan pelaksana ada beberapa unsur yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bagus Sudartono selaku koordinator kegiatan pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“Karena program ini sifatnya mendadak, jadi pelaksana programnya juga saya bentuk secara mendadak. Jadi karyawan Kecamatan Banyuwangi yang saya rasa tidak banyak pekerjaan di kantor itulah yang saya terjunkan untuk mengawal program ini. Jadi memang tidak jelas strukturnya, pokok ada pelaksana gitu saja”

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Indah Pratiwi selaku tenaga pelaksana kegiatan yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi pelaksana program ini tidak ada karena dibentuk mendadak. Jadi saya dan teman-teman pelaksana lain yang ditunjuk Bapak slamet untuk mengawal program ini adalah karyawan yang tugasnya tidak banyak waktu itu .”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Banyuwangi mengimplementasikan program perpustakaan keliling ini di akhir tahun dan tanpa konsep yang jelas, sehingga tidak banyak pihak yang terkait dalam program. Oleh karena itu, program perpustakaan keliling ini tidak banyak yang tahu baik dari unsure pemerintah maupun masyarakat karena tidak ada sosialisasi ataupun info tentang program ini sebelumnya.

4.2.5 Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan hal yang menjadi pusat perhatian. Keadaan atau kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat menentukan bagi pencapaian badan-badan pelaksana. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan atau program akan berjalan baik apabila keadaan atau kondisi ekonomi, sosial, dan politik di daerah tersebut dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi juga dapat mendukung adanya program perpustakaan keliling ini.

Untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi peneliti membatasi pada kesiapan dana untuk pelaksanaan program ini dan fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Imron Rosidi selaku petugas lapangan program ini pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“kita disini mendapatkan dana dari APBD untuk program ini, tapi memang awalnya program ini tidak direncanakan jadi dananya ya didapat dari sisa dana yang ada. Fasilitas khusus untuk pegawai tidak ada tapi cukup menunjang apa yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti mobil, buku-buku bacaan, dan kursi.”

Untuk melihat kebenaran informasi, maka peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) yakni dengan Budi Handoyo selaku koordinator program pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“ya untuk pembiayaannya, program ini didapat dari APBD. Karena awalnya dana ini tidak dianggarkan makanya dananya terbatas. Untuk fasilitas khusus tidak ada karena fasilitas yang diberikan hanyalah fasilitas penunjang saja seperti meja, kursi, buku, dan mobil tentunya sebagai asset utama agar perpustakaan keliling ini bisa berjalan.”

Pernyataan Budi Handoyo di atas dibenarkan oleh Camat Banyuwangi yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 berikut ini.

“Dana yang digunakan dalam implementasi program perpustakaan keliling ini murni dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 dan tidak ada fasilitas khusus apapun dari pemerintah karena program ini mendadak. Namun fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam program ini cukup menunjang, misalnya mobil, buku, dan kursi. Jadi intinya program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun mendadak dilakukan”.

Selanjutnya untuk melihat kondisi-kondisi sosial dan politik yang ada di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kebijakan ini, peneliti mewawancarai Tjatur Fajar selaku pelaksana kegiatan program perpustakaan keliling yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

“keadaan sosial masyarakat atau para peminat perpustakaan keliling ini sangat antusias dengan kebijakan ini artinya mereka merasa senang dengan adanya program ini sebagai sarana peningkatan pengetahuan. Sekali lagi, karena program ini awalnya tidak dianggarkan ya kami tidak pernah melakukan sosialisasi apapun terkait program ini sehingga tidak ada pihak yang mendukung, namun banyak kalangan yang mendukung program ini termasuk pemerintah sebagai salah satu program untuk meningkatkan minat baca di kalangan pelajar.”

Pernyataan di atas diperkuat oleh Imron Rosidi selaku tenaga pelaksana kegiatan yang peneliti wawancarai pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa:

masyarakat sangat antusias sekali ya dengan adanya program ini, karena dapat membaca secara gratis dan mudah untuk mengaksesnya. Karena program ini hanya sebentar saja, maka manfaatnya masih belum bisa kita rasakan. Dukungan secara simbolis dari pihak pemerintah atau dinas lain tidak ada karena program ini mendadak dan tidak ada sosialisasi apapun, jadi mereka memang benar-benar tidak tahu”

Untuk melihat kebenaran informasi, maka peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek informasi tersebut kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama (wawancara mendalam) yakni dengan Bagus Sudartono selaku koordinator kegiatan pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

‘Dalam hal ini tidak ada sharing, jadi dana alokasi ini resmi dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Karena memang awalnya di Renja tidak ada, maka ya dari sisa dana yang ada yang kami gunakan jadi tidak ada dukungan dari pemerintah atau dinas lain karena program ini mendadak dilakukan. Kalau kondisi sosial masyarakatnya ya senang dengan program ini kalau saya lihat ketika mereka mengunjungi perpustakaan pada saat itu, terutama pengunjung anak-anak atau pelajar .’

Kemudian untuk melihat apakah benar kondisi sosial di Kabupaten Banyuwangi ini mendukung berjalannya kebijakan ini, peneliti melakukan wawancara kepada Doni salah satu pelajar SMA Banyuwangi yang pernah mengunjungi perpustakaan keliling ini pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Saya pernah berkunjung ke perpustakaan ini tiga kali mungkin karena pas hari Jumat jadi pulanginya agak awal. Saya sangat senang dengan adanya perpustakaan ini karena bisa menambah wawasan, sayangnya hanya sebentar padahal teman-teman saya juga banyak yang tertarik dan ikut berkunjung ke perpustakaan ini setelah saya beritahu. Saya juga tidak tahu dari awal tentang program ini karena tidak ada pengumuman”.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Santi salah satu warga masyarakat Karangrejo yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“ya sangat senang sekali lah, kan program ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menumbuhkan minat baca bagi kalangan generasi muda yang saat ini sangat malas jika disuruh membaca. Sayangnya itu tadi program cuma sebentar dan banyak pihak yang tidak tahu karena tidak ada sosialisasi, saya saja tahu karena waktu itu di alun-alun ngantar anak jalan-jalan pas hari Minggu”.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari kebijakan program perpustakaan keliling ini tidak begitu mendukung, pada kondisi ekonomi ini tidak ada kesiapan dana karena program ini awalnya tidak direncanakan, sehingga dana yang digunakan merupakan dana sisa anggaran yang ada di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013. Untuk kondisi sosial juga kurang mumpuni karena banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program ini, sehingga mereka tidak sempat berkunjung ke perpustakaan keliling ini. Bagi masyarakat yang tahu akan program ini, mereka senang dengan program ini namun karena hanya berjalan beberapa bulan saja mereka menjadi kecewa dengan program ini. Kondisi politiknya dalam hal ini tidak ada karena program ini mendadak dilakukan, jadi tidak banyak pihak yang mengetahui adanya program ini sehingga tidak ada dukungan dari pemerintah atau pihak lain terkait program ini karena mereka tidak tahu akan adanya program ini.

4.2.6 Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Kecenderungan pelaksana atau sikap para pelaksana kebijakan (*implementors*) sangat penting diperhatikan, karena dengan pemahaman dan

adanya dukungan terhadap kebijakan ini maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sebaliknya. Dalam hal ini jika pelaksana sudah tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, maka pelaksana tersebut melaksanakan kegiatan dengan setengah hati atau tidak maksimal.

Kemudian untuk melihat bagaimana sikap pelaksana dalam kebijakan ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaksana yakni Tjatur Fajar pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Sependapat sekali saya dengan program perpustakaan keliling ini karena dapat meningkatkan minat baca pada masyarakat terutama generasi muda sekarang yang sangat amat malas sekali jika disuruh membaca karena mereka lebih suka internet dan *games*.”

Pendapat tersebut dinyatakan juga oleh Imron Rosidi selaku tenaga pelaksana kegiatan yang peneliti wawancarai pada tanggal 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Ya sangat sependapat sekali dengan adanya program ini, karena sebagai pegawai saya harus mendukung pemerintah mas meskipun program ini hanya beberapa bulan saja namun banyak manfaatnya jika diteruskan karena dapat menumbuhkan minat baca dikalangan remaja dan anak-anak yang makin lama makin memudar .”

Hal senada juga diungkapkan Indah Pratiwi selaku tenaga pelaksana kegiatan yang peneliti lakukan wawancara pada 3 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Sangat sependapat sekali ya, selama ini kita lihat banyak anak-anak dan remaja mulai malas untuk membaca karena bagi mereka hal ini membosankan dan tidak menarik. Padahal buku adalah jendela dunia, jika mereka malas baca dari mana bisa pintar nantinya. Memang pengaruh teknologi yang begitu maju telah membuat mereka beralih dan lebih menyukai permainan dan hp daripada membaca.”

Pernyataan Tjatur Fajar, Imron Rosidi, dan Indah Pratiwi di atas juga dibenarkan oleh Abdul Azis selaku Camat Banyuwangi berikut ini.

“Saya sebagai pemimpin Kecamatan ini sangat senang dan mendukung program perpustakaan keliling, makanya program ini rencananya akan seallu saya anggarkan setiap tahunnya untuk meningkatkan minat baca pada generasi muda utamanya karena minat baca kaum muda saat ini sangat rendah. *Gadget*, internet, dan *game* lebih menarik bagi mereka daripada membaca, padahal buku adalah jendela dunia” (Senen, 3 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksana program ini sangat sependapat dengan adanya kegiatan ini dan sangat mendukungnya. Untuk pemahaman tentang kebijakan ini, peneliti melihat dari awal wawancara mengenai ukuran dan landasan kegiatan dan hal itu sudah dipahami oleh semua pelaksana kegiatan kebijakan ini. Jadi kebijakan ini berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dan pemahaman kebijakan dari para pelaksananya.

. Dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka keenam faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa enam faktor tersebut tidak saling mendukung terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang nantinya arahnya pada prestasi kerja yang diharapkan yakni tercapainya tujuan-tujuan kebijakan seperti yang digambarkan oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pustaka bab 2. Kebijakan ini adalah kebijakan yang sedang berjalan, belum semua tujuan-tujuan tercapai tetapi saat ini program ini telah selesai dan dianggarkan lagi pada tahun depannya.

Dalam pelaksanaannya para pegawai pelaksana program perpustakaan keliling ini melakukan tanpa prosedur yang jelas karena program ini awalnya memang tidak direncanakan dalam Renja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013, sehingga program ini terkesan asal-asalan. Bahkan program ini hanya berjalan kurang lebih tiga bulan dan banyak masyarakat maupun pemerintah dari dinas atau instansi lain yang tidak tahu program ini, padahal sebenarnya banyak masyarakat terutama generasi muda yang sangat membutuhkan program ini.

Implementasi program perpustakaan keliling ini tidak mengalami kendala bahkan masyarakat sangat senang dengan adanya program ini, namun karena programnya mendadak dan sebelumnya tidak ada sosialisasi maka instansi lain tidak ada yang mendukung adanya program ini, namun sebenarnya ketika mereka

mengetahui ada program ini mereka sangat mendukung. Mungkin untuk lebih mengoptimalkan implementasi program ini, maka pemerintah Kecamatan Banyuwangi sangat perlu memasukkan program ini dalam rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2014.

Selanjutnya untuk memperjelas hasil penelitian ini, peneliti menyajikan ke dalam Matrik Hasil Analisis Data program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.



Tabel 4.5 Matrik Hasil Analisis Data Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Variabel	Indikator	Hasil Pengumpulan Data	Kriteria Implementasi
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Ukuran-ukuran dasar	Ukuran dasar kebijakan Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013	Tidak semua petugas pelaksana kebijakan memahami ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dan penerima kebijakan ini juga tidak semuanya memahami apa yang telah menjadi ukuran dari adanya program.
	Tujuan Kebijakan	Untuk menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat terutama generasi muda.	Tujuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Banyuwangi juga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Banyuwangi semuanya karena program ini hanya berjalan sebentar, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya program ini. Bagi pihak pemerintah, program ini tidak terdapat dalam Renja Kecamatan banyuwangi, namun dalam LAKIP Kecamatan Banyuwangi program ini ada.
Sumber-Sumber Kebijakan	Adanya dana untuk pelaksanaan kegiatan	Dana ini berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 yang merupakan dana sisa yang digunakan oleh Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2013 karena program ini tidak ada dalam renja Kecamatan banyuwangi tahun 2013.	Untuk dana program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp 13.280.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 11.212.500 yang berarti anggaran yang terserap sebesar 84,43%. Dana ini merupakan dana sisa yang ada di Kecamatan banyuwangi pada tahun 2013.
	Jumlah personel untuk implementasi program	Jumlah personel yang diterjunkan hanya berjumlah empat orang yang selanjutnya dibagi menjadi dua tim. Jadi setiap tim terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai sopir dan pelayan masyarakat	Jumlah personel sangatlah minim karena programnya mendadak dilakukan, jadi jumlah personel yang diterjunkan adalah pegawai Kecamatan Banyuwangi yang

		yang berkunjung ke perpustakaan..	tidak mempunyai tugas yang berat saat itu. Sebenarnya hal ini tidak cukup efektif jumlah personelnnya jika banyak pengunjung perpustakaan.
Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana.	Komunikasi antar organisasi.	Tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Banyuwangi baik dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah terkait program ini karena programnya mendadak.	Tidak dilaksanakan dengan baik karena tidak ada komunikasi dengan pihak Kelurahan, masyarakat, maupun pihak lain terkait program perpustakaan keliling.
	Sosialisasi.	Tidak ada sosialisasi apapun terkait program ini sebelum diimplementasikan.	Tidak banyak masyarakat maupun instansi pemerintah yang mengetahui program ini, sehingga tidak bisa berjalan dengan efektif karena kurangnya dukungan dari pihak lain juga.
Karakteristik Badan Pelaksana	Staf	Hanya berjumlah empat orang dan dibagi dua tim, sehingga satu tim berjumlah dua orang.	Tidak tepat pelaksana karena jumlahnya tidak mencukupi dan tugas mereka juga tumpang tindih.
	Pembagian Kerja	Dalam pelaksanaan program ini tidak jelas tugas dan fungsinya karena bersifat mendadak. Jadi yang ditugaskan dalam program ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang berat pada saat itu.	Dilaksanakan dengan baik karena hanya ada dua personel yang sudah dibagi tugas pokok dan kerjanya, yakni sebagai sopir dan pelaksana lapangan yang bertugas melayani masyarakat yang datang ke perpustakaan.
Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	Kondisi Ekonomi	Untuk sumber ekonomi tidak dianggarkan sebelumnya di Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 201, sehingga dana yang didapat berasal dari sisa dana yang ada di Kecamatan Banyuwangi tahun 2013.	Kurang terlaksana dengan baik karena dana yang ada minim jumlah dan waktu pelaksanaanya juga relative cepat, sehingga tidak semua dana terserap.
	Kondisi Sosial	Dana ini berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.	Cukup baik, tepat kebijakan kerena banyak dukungan dari semua pihak sebenarnya, namun karena sebelumnya tidak ada sosialisasi jadi kurang efektif programnya.
	Kondisi Politik	Masyarakat dan instansi pemerintah lain sangat senang dan mendukung adanya program ini, namun tidak adanya sosialisasi terkait program ini maka banyak masyarakat dan instansi pemerintah lain yang mengetahui program	Tidak ada karena program ini mendadak dilakukan, jadi tidak banyak pihak yang mengetahui adanya program ini sehingga tidak ada dukungan dari pemerintah atau pihak lain

		ini.	terkait program ini karena mereka tidak tahu akan adanya program ini.
		Tidak ada dukungan dari pihak pemerintah atau instansi lain karena mereka tidak tahu program dan tidak ada koordinasi sebelumnya.	
Kecenderungan Pelaksana (implementors)	Pemahaman Pelaksana Program	Tidak semua pelaksana program memahami tujuan program ini karena programnya memang tidak direncanakan sebelumnya.	Tidak cukup baik karena tidak semua pelaksana program memahami program ini karena programnya mendadak dilakukan.
	Tanggapan dari Para Pelaksana Kebijakan	Seluruh pelaksana kebijakan sangat sependapat dan mendukung sekali dengan adanya program ini.	Sangat baik, karena semua pelaksana sependapat dan mendukung program ini sehingga menunjang pelaksanaannya. Karene jika para pelaksana mendukung kegiatan ini, maka mereka akan melaksanakannya dengan sepenuh hati.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 belum berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik karena pelaksanaannya mendadak, sehingga tidak banyak diketahui orang dan hanya berjalan kurang lebih tiga bulan.
2. Pedoman implementasi program ini adalah Surat Perintah Tugas Camat Banyuwangi Nomor: 010/616/429.501/2013 yang berisi perintah untuk melaksanakan program perpustakaan keliling pada Bagus Sudartono, Imron Rosidi, Tjatur Fajar, dan Indah Pratiwi. Namun surat ini hanya berisi surat tugas saja tanpa adanya pedoman pelaksanaan dan tupoksi yang jelas. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kecamatan Banyuwangi menyediakan 2 mobil yang beroperasi secara bergantian pada hari Senin sampai Jumat di tempat yang telah ditentukan dan setiap tempat mendapatkan jadwal tiga kali dalam seminggu mulai dari jam 12.00 sampai dengan 15.00. Seharusnya program ini dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, namun karena waktu yang terbatas serta personel dan akomodasi yang minim, maka program perpustakaan keliling hanya dilakukan di kelurahan yang berada di Banyuwangi kota, yakni Kelurahan Kebalenan, Sobo, Tukang Kayu, Karangrejo, dan Kertosari.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan implemenasi program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan berikut ini.

1. Untuk implementasi program perpustakaan keliling selanjutnya diharapkan menambah mobil dan personel agar dapat lebih memberikan pelayanan prima pada masyarakat karena jumlah kendaraan dan personel sangat minim untuk mencapai tujuan program ini.
2. Sebaiknya program perpustakaan keliling ini diimplementasikan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi, jangan hanya di kelurahan yang ada di dalam kota agar tujuan program perpustakaan keliling sebagai sarana meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak dan remaja di Kecamatan Banyuwangi dapat tercapai.
3. Koordinasi dan sosialisasi dengan unsur pemerintah lainnya serta *stakeholder* lain sangat penting dilakukan sebelum suatu program diimplementasikan agar program ini nantinya diketahui dan diharapkan mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* , sehingga tujuan program lebih mudah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faisal, S. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadidjaja. 2003. *Kebijakan Negara Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soenarko S. D. 2000. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Universitas Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah*. Jember: UNEJ
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.

Website

<http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf>

<http://manajemenproyek.ac.id>

<http://www.geocities.ws/bukukmhdi/bpo23.html>

www.proyeksukses.com



Nomor : 3455/UN25.1.2/LT/2014
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

3 Oktober 2014

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenankan mahasiswa kami :

Nama : Anggun Pramita Sari
NIM : 090910201079
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di :

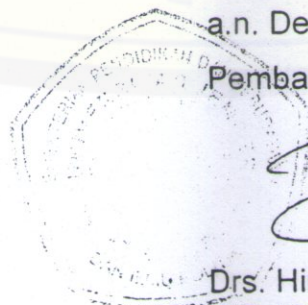
1. Kantor Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
2. Kantor Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
3. Kantor Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 19610828199201 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1608/UN25.3.1/LT/2014
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

10 Oktober 2014

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3455/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 03 Oktober 2014, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Anggun Pramita Sari/090910201079
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember
Alamat / HP : Perum Nias Cluster Jember/HP. 085746502180
Judul Penelitian : Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
2. Kantor Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi
3. Kantor Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : Dua bulan (10 Oktober 2014 – 10 Desember 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas FISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 21 Oktober 2014

Nomor : 072/1878/REKOM/429.204/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada .
Yth. 1. Camat Banyuwangi
2. Camat Giri
3. Camat Glagah
di -
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Tanggal : 10 Oktober 2014
Nomor : 1608/UN25.3.1/LT/2014
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada
N a m a : ANGGUN PRAMITA SARI
N I M : 090910201079
Bermaksud melaksanakan Penelitian :
Judul : Implementasi Program Kerja Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
Tempat : Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah
Waktu : 21 Oktober 2014 s.d 10 Desember 2014

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi,Pembauran dan Wawasan
Kebangsaan
Uj. Kasubid Wawasan Kebangsaan



Tembusan :

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator, sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan Realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan hasil pengukuran dapat di ilustrasikan dalam tabel sbb:

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)	
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Rata - rata lama penyelesaian Pengajuan KK per KK (Persyaratan Lengkap)	menit	10	10	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Pengajuan KTP per KTP (Persyaratan Lengkap)	menit	5	5	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Surat Keterangan Pindah Tempat tinggal	menit	15	15	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Pengajuan SKCK per SKCK	menit	5	5	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Pelayanan Rekomendasi Ijin	menit	10	10	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Penanda tangan Proposal	menit	30	30	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Pelayanan SPM	menit	5	5	100%	
	Rata - rata lama penyelesaian Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli tanah	tahun	120	111	93%	
	Rata - rata lama penyelesaian Legalisir	menit	5	5	100%	
	Penyediaan sarana dan prasarana yang representatif di ruang pelayanan public	AC		2	2	100%
		Meja pelayanan		2	2	100%
		Kursi tunggu		3 set	3 set	100%

	brosur layanan	1 paket	1 paket	100%	
	Majalah / Media Cetak Koran	1 paket	1 paket	100%	
Sarana Pengaduan yang tersedia :					
- Kotak Pengaduan	ada	1	1	100%	
- Loker Pengaduan	ada	1	1	100%	
- Telepon Khusus Pengaduan dan dioperasikan	ada	1	1	100%	
- Email pengaduan dan Dioperasikan	ada	1	1	100%	
- Buku Register Pengaduan	ada	1	1	100%	
Sistem / Prosedur Pengolahan Pengaduan Pengguna layanan	Sistem	1	1	100%	
Petugas Khusus yang menangani pengelolaan Pengaduan	orang	2	2	100%	
Prosentase jumlah pengaduan yang dapat terselesaikan	%	100	100	100%	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	75	70	93%	
Baliho yang dipasang terkait informasi pelayanan publik	buah	9	9	100%	
Jumlah informasi layanan yang disampaikan melalui sistem informasi pelayanan secara elektronik/ portal banyuwangi pada Web Site : banyuwangikab.go.id dalam 1 tahun	informasi	24	24	100%	
2. Meningkatnya Keindahan, Kebersihan Kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup	Luas RTH yang tertata dengan Baik	m2	160	160	100%
	Jumlah Tanaman RTH	tanaman	200	200	100%
	Gerakan Kebersihan " Jum'at Bersih " yang dilaksanakan dalam 1 bulan	Kegiatan	2	2	100%
	Sosialisasi tentang kebersihan	kegiatan	2	2	100%

	lingkungan dalam 1 bulan				
	Prosentase kelurahan yang melaksanakan Jum'at bersih	%	75	75	100%
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Perencanaan Pembangunan	Musrenrenbangcam yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kegiatan	1	1	100%
	Tingkat Partisipasi masyarakat dlm penyusunan Perencanaan Pembarigunan di Kecamatan :				
	- Tokoh Masyarakat	orang	25	25	100%
	- Tokoh Agama	orang	25	25	100%
	- LSM	orang	25	10	40%
	- Unsur organisasi Wanita	orang	18	18	100%
	- Delegasi Kelurahan	orang	90	90	100%
	- Unsur Masyarakat lainnya	orang	70	60	86%
Prosentase usulan kegiatan oleh masyarakat (kelurahan) yang direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	%	75	60	80%	
4. Terciptanya lingkungan Yang aman, Tertib dan Kondusif	Penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kegiatan	2	2	100%
	Sosialisasi tentang keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kegiatan	2	2	100%
	Jumlah poskamling aktif se kecamatan	buah	36	33	91%
	Prosentase penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat	%	25	20	80%
	Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam 1 tahun	kegiatan	12	12	100%
	Pemantauan Rumah Kos dalam 1 tahun	kegiatan	12	12	100%
	5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintah kecamatan di bidang peraturan	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan bagi aparatur kecamatan dalam 1 tahun	kegiatan	6	6



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANYUWANGI

Jl. Jendral A. Yani No. 101 ☎ (0333) 424232 Fax. 425407 Banyuwangi
<http://www.banyuwangikab.go.id>-email: kec-banyuwangi@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI (68416)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 010/ 616/429.501/2013

Guna menunjang oprasional pelayanan perpustakaan keliling kepada Masyarakat di Kecamatan Banyuwangi ;

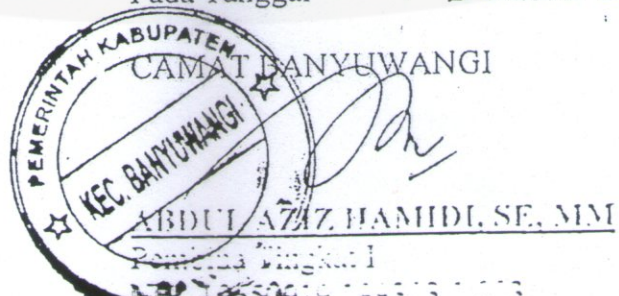
MEMERINTAHKAN

- KEPADA : 1. Sdr.GOENAWAN
2.Sdr.BAGUS SUDARTONO
3. Sdr.IMRON ROSIDI
4. Sdr.TJATUR FAJAR
5. Sdr.INDAH PRATIWI
- UNTUK : 1. Melaksanakan tugas pokok sebagai Petugas Pelayanan Perpustakaan keliling sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Melaksanakan Tugas Tambahan yang diberikan oleh atasan.
- CATATAN : Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2013

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 2 Oktober 2013



PEDOMAN WAWANCARA

No	Info yang Dicari	Dimana	Sumber Data	Metode	Instrumen	Lampiran Keterangan
1.	Ukuran dasar program. Tujuan program.	Kecamatan. Masyarakat Kec. Banyuwangi.	Camat (Abdul aziz Hamidi), Sekretaris (Sujati), dan Kepala Bidang Sosial Budaya Kec. Banyuwangi (Goenawan). Saraswati, Diana, dan Ridho.	Wawancara.	Pedoman Wawancara	Apa ukuran dasar dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013?. Mohon anda jelaskan! Apakah anda pernah tahu perpus keliling yang disediakan oleh Kecamatan banyuwangi?. Jika iya, bagaimana pendapat anda tentang program ini? Mencari dasar hukum dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Banyuwangi tahun 2013 dalam LAKIP dan Renja.
2	Sumber dana.	Kecamatan.	LAKIP dan Renja Kec. Banyuwangi Tahun 2013	Dokumentasi.	Pedoman Wawancara	Dari mana saja sumber dana program ini? dan jika berkenan mohon anda sebutkan besaran dananya!.
3	Komunikasi implementasi program.	Kecamatan. Kelurahan.	Camat (Abdul aziz),Purwanto (Kepala bagian keuangan). Siti Fatimah (Bendahara). Bagus Sudartono (Kordinator program). LAKIP dan Renja Kec. Banyuwangi Tahun 2013	Dokumentasi.	Pedoman Wawancara	Mencari sumber dan besaran dana yang digunakan pihak Kecamatan Banyuwangi dalam implementasi program perpustakaan keliling.
4.	Unsur yang mempengaruhi badan dalam implementasi program.	Kecamatan. Kecamatan.	Lurah Kebalenan (Betti) Camat (Abdul aziz),Imron Rosidi (Petugas lapangan), Bagus Sudartono (Kordinator program). Goenawan selaku Kepala Bidang sosial dan budaya.	Wawancara.	Pedoman Wawancara	Apakah pihak Kec. Banyuwangi pernah melakukan koordinasi atau sosialisasi dengan pihak Kelurahan Kebalenan terkait program perpustakaan keliling ini?. Jika iya, mohon bapak/ibu jelaskan! Apakah ada pembagian tugas dalam implementasi program ini?. Jika iya, bagaimana pembagiannya?. Mohon jelaskan! Apakah ada koordinasi dengan pihak lain dalam implementasi program ini? Baik dengan pemerintah, masyarakat, ataupun pihak swasta? Jika iya, mohon anda jelaskan!.

PEDOMAN WAWANCARA

	Kelurahan.	(Petugas lapangan) Kelurahan Tukangkayu	Wawancara.	Pedoman Wawancara	Apakah pihak Kelurahan ini tahu jika ada program perpustakaan keliling di Kec. Banyuwangi?. Jika iya, apakah sebelumnya bapak/ibu mendapatkan sosialisasi atau koordinasi dari pihak kecamatan?.
5	Masyarakat.	Ayub.	Wawancara.	Pedoman Wawancara.	Apakah bapak tahu ada program perpustakaan keliling di Kecamatan Banyuwangi?. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang program ini sebelum diimplementasikan?.
6	Kecamatan.	Camat (Abdul aziz), Imron Rosidi dan Tjatur Fajar (petugas lapangan), Bagus Sudartono (Koordinator program).	Wawancara.	Pedoman Wawancara.	Apakah ada kesediaan dana dan fasilitas khusus dalam implementasi program ini?. Jika iya, mohon anda jelaskan tentang dana dan fasilitas ini!.
7	Kecamatan.	Camat (Abdul aziz), Imron Rosidi dan Tjatur Fajar (petugas lapangan), Bagus Sudartono (Koordinator).	Wawancara.	Pedoman Wawancara.	Apakah ada dukungan pemerintah untuk program ini?. Jika ada, mohon anda jelaskan bagaimana bentuk dukungan tersebut!.
8	Pelajar Masyarakat	Doni Santi.	Wawancara.	Pedoman Wawancara	Apakah anda pernah tahu ada program perpustakaan keliling di Kec. Banyuwangi?. Jika iya, bagaimana tanggapan dan harapan anda dengan adanya program ini?.
	Kecamatan.	Camat (abdul aziz), Imron Rosidi, Indah Pratiwi, dan Tjatur Fajar (petugas lapangan)			Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap implementasi program ini?.